



PERBANAS
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL

Evaluasi Ekonomi dan Sektor Perbankan Indonesia 2023 dan *Outlook* 2024

KATA PENGANTAR

Dengan bangga kami mempersembahkan Kajian Tahunan terkait “Evaluasi Ekonomi dan Sektor Perbankan Indonesia 2023 dan *Outlook 2024*”. Kajian ini adalah buah pemikiran para ahli di bidang ekonomi dan perbankan di Republik ini, guna mengajak kita merefleksikan apa yang terjadi di sektor perbankan serta ekonomi nasional selama 2023, seraya menatap optimisme 2024.

Terlepas dari badai ketidakpastian yang terjadi tahun lalu, perekonomian dan perbankan nasional telah membuktikan dirinya tetap tangguh menghadapi berbagai kondisi selama 2023. Kajian ini menceritakan bagaimana perekonomian dan sektor perbankan nasional berlayar di atas gelombang ekonomi global yang tak terduga dan dinamika nasional yang terjadi.

Kajian ini juga mengangkat secara khusus isu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia. UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi, terus mendapatkan perhatian khusus dalam diskursus kebijakan ekonomi, mengingat peranannya yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, isu EBT menjadi semakin penting dalam konteks transisi energi dan upaya mitigasi perubahan iklim. Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang kaya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan EBT. Buku ini menyediakan analisis terhadap perkembangan terkini sektor UMKM dan EBT di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi, serta peran sektor perbankan dalam mendukung investasi dan pengembangan EBT.

Besar harapan kami, kajian ini menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca, termasuk para praktisi perbankan, pembuat kebijakan, akademisi, pers, dan masyarakat umum, tentang dinamika sektor perbankan dan ekonomi Indonesia. Para peneliti telah mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya mempersembahkan karya ini kepada kita. Terima kasih kepada para peneliti. Semoga buku ini dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang mendalami ekonomi dan perbankan Indonesia.

Kartika Wirjoatmodjo

Ketua Umum PERBANAS 2020-2024

TIM PENYUSUN

Dewan Pengarah

Anika Faisal dan Aviliani

Editor

Rofikoh Rokhim

Ketua Tim Penulis

Dzulfian Syafrian

Anggota Tim Penulis

Syifa R. Rosyadah dan Dendy Indramawan

Reviewers

Winang Budoyo, David Sumual, Enrico Tanuwidjaja,
Juniman, Josua Pardede.

Jakarta, Maret 2024

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
1. KONDISI EKONOMI GLOBAL	2
1.1. Tren Inflasi dan Suku Bunga Pada 2023	3
1.1.1. Perkembangan Inflasi	3
1.1.2. Perkembangan Suku Bunga	5
1.2. Kondisi Ekonomi Tiongkok	9
1.3. Kondisi Ekonomi AS	12
1.4. Kondisi Ekonomi Uni Eropa	14
1.5. Kondisi Ekonomi Jepang	17
2. PEREKONOMIAN DOMESTIK: TUMBUH STAGNAN	20
2.1. Inflasi	24
2.2. Nilai Tukar	27
2.3. Perkembangan Fiskal	35
3. ISU-ISU PERBANKAN	38
3.1 Kinerja Sektor Perbankan 2023	38
3.1.1. Penyaluran Kredit Perbankan	38
3.1.2. Kondisi NPL Perbankan	40
3.1.3. Tren Suku Bunga	42
3.1.4. Likuiditas Perbankan	44
3.1.5. Tren Kredit Sektoral Menjelang Pemilu	46
3.2 Energi Baru Terbarukan (EBT)	54
3.3 UMKM Indonesia	60
4. PROYEKSI INDIKATOR EKONOMI 2024	67
5. KESIMPULAN	69
6. LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Inflasi Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya, Q1 s.d. Q3 2023	3
Gambar 1.2 Beberapa Indikator Ekonomi Tiongkok	9
Gambar 1.3 Indikator Ekonomi Amerika	12
Gambar 1.4 Indikator Ekonomi Uni Eropa	15
Gambar 1.5 Indikator Ekonomi Jepang	17
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% , yoy)	18
Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi 2023	21
Gambar 2.3 Inflasi Indonesia 2019 - 2023	22
Gambar 2.4 Harga Pangan 2023 (Rp)	25
Gambar 2.5 Perubahan Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 2023 (% , yoy)	27
Gambar 2.6 Index Harga Komoditas Global	28
Gambar 2.7 Proporsi Komoditas Impor Indonesia 2003 vs 2022	29
Gambar 2.8 Proporsi Komoditas Ekspor Indonesia 2003 vs 2022	30
Gambar 2.9 Top 5 Mitra Dagang Indonesia 2023	32
Gambar 2.10 Neraca Pembayaran Indonesia 2016-2023 (Juta USD)	32
Gambar 2.11 Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemerintah	33
Gambar 2.12 Defisit Fiskal dan Proporsi Defisit Fiskal terhadap PDB Indonesia	34
Gambar 2.13 Pendapatan dan Belanja Negara 2022-2023 (Triliun Rupiah)	34
Gambar 3.1 Pertumbuhan DPK dan Kredit (% , yoy)	35
Gambar 3.2 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis, 2019-2023 (% , yoy)	36
Gambar 3.3 NPL Perbankan berdasarkan Jenis	38
Gambar 3.4 Transmisi Suku Bunga BI terhadap Suku Bunga Lainnya, 2017-2023	40
Gambar 3.5 Pertumbuhan Kredit, DPK, & NPL, 2005-2023	47
Gambar 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Kredit, DPK, & NPL Selama Pemilu	48
Gambar 3.7 Pola Porsi dan Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor	49
Gambar 3.8 Porsi Tenaga Kerja vs Pertumbuhan Kredit	50
Gambar 3.9 Investasi Energi Bersih dan Bahan Bakar Fosil (Miliar USD)	51
Gambar 3.10 Investasi Energi Bersih Berdasarkan Jenis (Juta USD)	52
Gambar 3.11 Penambahan Investasi Energi Bersih Baru Selama 2022 (Miliar USD)	53
Gambar 3.12 Total Investasi Energi Bersih Indonesia	56
Gambar 3.13 Porsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	60
Gambar 3.14 Proyeksi Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan (%)	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Suku Bunga Acuan Indonesia dan Berbagai Negara Lain, 2023	6
Tabel 2.1 Pertumbuhan dan Proporsi PDB Indonesia Berdasarkan Pengeluaran 2020-2023	19
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor (% , yoy)	20
Tabel 2.3 Perubahan harga pangan 2023 (mtm)	23
Tabel 2.4 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Beberapa Mata Uang (% , mom)	26
Tabel 3.1 Rata-Rata Saldo Tabungan Masyarakat Indonesia, 2018-2023	42
Tabel 3.2 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor	44
Tabel 4.1 Proyeksi Indikator Utama Makroekonomi & Perbankan 2024	64
Tabel 4.2 Proyeksi Pertumbuhan Kredit Perbankan, by Sektor 2024	65
Tabel 6.1 Perkembangan Kredit Perbankan, by Sektor 2019-2023 (Miliar Rp)	67
Tabel 6.2 Pertumbuhan Kredit Perbankan, by Sektor 2014-2023 (Miliar Rp)	68

Kondisi Ekonomi Global



1. KONDISI EKONOMI GLOBAL

Tahun 2024 membawa angin perubahan yang dipenuhi dengan campuran optimisme dan ketidakpastian. Optimisme tumbuh dari langkah-langkah ekonomi yang diambil oleh institusi global, terutama The Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat. Inflasi global yang melandai membuka ruang bagi The Fed untuk mengadopsi pendekatan *Dovish* dalam kebijakannya. Hal ini memicu harapan bahwa tingkat suku bunga mungkin tidak akan naik secara drastis, memberikan ruang bernafas bagi pasar dan bisnis untuk pulih dan berkembang.

Namun, gambaran ekonomi global tidak sepenuhnya cerah. Mata dunia tertuju pada Tiongkok, yang mesin ekonominya diproyeksikan mengalami stagnasi. Sebagai pemain kunci dalam perekonomian Asia dan dunia, perlambatan di Tiongkok dapat memberikan dampak negatif yang luas, mengurangi permintaan untuk ekspor dari negara lain dan menurunkan laju pertumbuhan global. Tidak hanya itu, penurunan harga komoditas menambah tekanan terutama bagi negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor sumber daya alam, seperti Indonesia. Penurunan ini dapat mempengaruhi keseimbangan perdagangan, nilai tukar mata uang, dan keseluruhan stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, dalam lingkup global, krisis pangan muncul sebagai ancaman yang terus terjadi. Berbagai faktor, seperti ketidakstabilan iklim yang mengakibatkan kekeringan atau banjir di beberapa daerah pertanian utama, konflik geopolitik yang mempengaruhi jalur distribusi dan perdagangan pangan, serta gangguan yang berkepanjangan dalam rantai pasokan, semuanya berkontribusi terhadap risiko bagi produksi dan distribusi pangan. Kondisi ini secara khusus menimbulkan risiko bagi Masyarakat rentan, di mana akses terhadap makanan yang bergizi dan terjangkau menjadi semakin terbatas yang dapat memperdalam kerawanan sosial di berbagai belahan dunia.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh perekonomian global pada tahun 2024, suhu politik dunia juga terpantau mengalami eskalasi yang signifikan. Lebih dari 60 negara akan mengadakan pemilu selama 2024, merepresentasikan setengah penduduk dunia, termasuk negara-negara utama seperti AS, EU, UK, Rusia, India, Pakistan, dan tentunya Indonesia. Ketegangan geopolitik, yang terutama ditandai oleh persaingan antarnegara yang semakin intens telah menciptakan ketidakpastian. Beberapa negara tetap mengadopsi kebijakan proteksionisme yang berpotensi mengganggu perdagangan bebas dan aliran investasi lintas batas. Kondisi ini

tidak hanya meningkatkan volatilitas pasar keuangan, tetapi juga berpotensi meredam investasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara yang ekonominya sangat tergantung pada perdagangan internasional. Dengan demikian, konstelasi politik global saat ini menambah lapisan kompleksitas pada tantangan ekonomi yang sudah ada, dan memerlukan penanganan yang cermat dan strategis dari para pemangku kebijakan serta pemimpin dunia.

Dalam perspektif global, tahun 2024 dengan segala potensinya, nampaknya akan menjadi tahun yang menuntut kebijaksanaan, ketahanan, dan kerja sama internasional yang erat untuk menghadapi tantangan yang ada dan membuka jalan bagi peluang baru. Bab ini akan membahas secara lebih rinci berbagai perkembangan tantangan ekonomi global ini selama 2023-2024, khususnya terkait perkembangan berbagai indikator ekonomi di negara-negara yang penting bagi perekonomian Indonesia, seperti Tiongkok, AS, Uni Eropa, dan Jepang.

1.1. Tren Inflasi dan Suku Bunga Pada 2023

Efek lanjutan pandemi COVID-19 dan konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi dua faktor utama yang mendorong dinamika ekonomi global selama 2023. Ketika kebijakan restriktif terkait pandemi mulai mereda, permintaan barang dan jasa mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena ini terutama terlihat di negara-negara maju, di mana kegiatan ekonomi berangsur pulih dan gairah konsumen untuk berbelanja kembali menggeliat. Peningkatan permintaan ini, sayangnya dihadapkan oleh kondisi pasokan yang belum sepenuhnya pulih dan siap, sebagian masih terganggu akibat dampak lanjutan pandemi.

Selain tekanan dari sisi permintaan, konflik yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak signifikan terhadap harga komoditas global. Kedua negara ini memainkan peran vital dalam pasokan beberapa komoditas penting, termasuk minyak bumi, gas, dan gandum. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global telah mengganggu pasokan komoditas ini, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan. Peningkatan harga energi khususnya, memiliki dampak domino terhadap berbagai sektor ekonomi, meningkatkan biaya produksi dan transportasi secara luas sehingga berujung pada tingginya inflasi, khususnya di negara-negara barat.

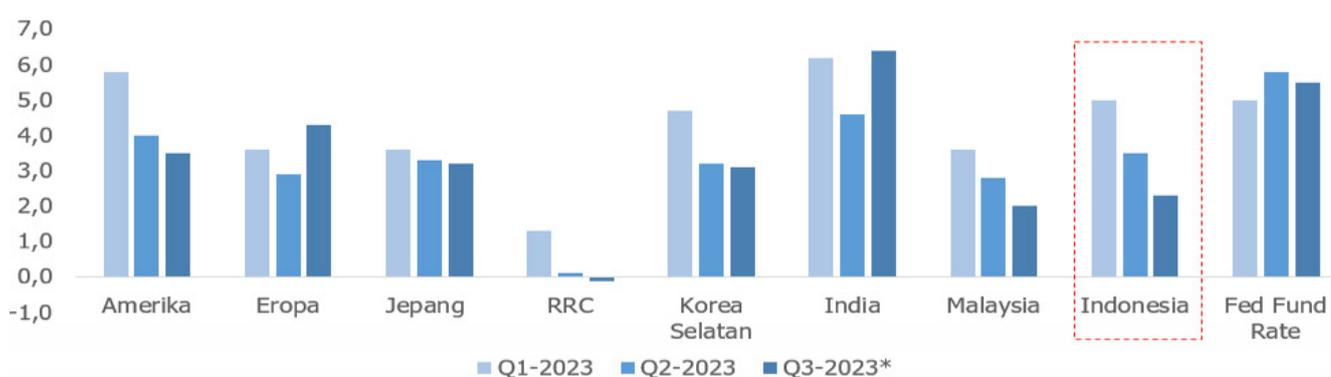
1.1.1. Perkembangan Inflasi

Kombinasi dari peningkatan permintaan pasca-pandemi dan gangguan pasokan akibat konflik geopolitik ini telah menciptakan tekanan inflasi yang signifikan pada tahun 2022-2023. Tingkat inflasi yang tinggi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembuat kebijakan. Di satu sisi

(*demand side*), mereka harus merespons dampak inflasi demi menjaga daya beli masyarakat, di sisi lain (*supply side*) mereka juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada komoditas-komoditas tertentu dan sifatnya strategis. Berbagai tindakan dan kebijakan yang diambil tidak hanya akan berdampak pada stabilitas harga, tetapi juga pada berdampak pada trajektori pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Salah satu indikator yang menonjol selama 2023 adalah tren inflasi di sejumlah negara maju yang mengalami penurunan. Pencapaian ini mencerminkan hasil dari berbagai langkah kebijakan yang telah diambil untuk mengendalikan tekanan harga yang meningkat sejak pandemi dan berbagai krisis geopolitik yang mengikutinya. Di Amerika Serikat, Eropa, Korea Selatan, dan Jepang, upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil, dengan tingkat inflasi berhasil ditekan hingga ke angka sekitar 3 persen pada kuartal ketiga (Q3) tahun 2023. Pencapaian ini bukanlah hal yang mudah, mengingat tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ini tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan moneter yang ketat merupakan faktor kunci dalam penurunan inflasi melalui intervensi pada *demand side*. Selain itu, *supply side* secara bertahap pulih sehingga menekan inflasi global. Utamanya, komoditas strategis seperti komoditas energi mengalami normalisasi harga sehingga menurunkan inflasi. Tercatat rata - rata harga minyak bumi Brent telah menurun sebesar 17,8 persen (yoy) dan batubara menurun sebesar 27,3 persen (yoy).

Gambar 1.1 Inflasi Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya, Q1 s.d. Q3 2023



Sumber: Bank Indonesia

Namun, meskipun tren penurunan ini merupakan kabar baik, masih terdapat kehati-hatian di antara para pembuat kebijakan. Tingkat inflasi yang masih tergolong tinggi dari kondisi normal mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan untuk mencapai stabilitas harga belum sepenuhnya usai.

Kondisi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya responsif tetapi juga proaktif, dengan fokus pada penguatan struktur ekonomi domestik dan peningkatan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

Peta inflasi negara berkembang menunjukkan pola yang beragam. Tiongkok sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi dunia mengalami deflasi sebesar 0,1 persen pada kuartal ketiga tahun 2023. Kondisi deflasi ini menandai adanya penurunan dalam aktivitas ekonomi, yang bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penurunan dalam konsumsi domestik atau investasi, serta kelebihan kapasitas produksi sehingga terjadi *oversupply*.

Berbeda dengan situasi di Tiongkok, India justru mengalami tekanan inflasi yang signifikan, dengan tingkat inflasi sebesar 6,4 persen pada kuartal ketiga 2023. Inflasi ini terutama didorong oleh kenaikan harga pangan, yang menekan pendapatan dan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh India dalam mengelola pertumbuhan ekonomi seiring dengan menjaga stabilitas harga, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global dan tekanan pasokan.

Sementara itu, Malaysia dan Indonesia menunjukkan kinerja yang mencolok dalam mengendalikan inflasi, dengan berhasil menjaga angka inflasi di kisaran 2 persen di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global. Kedua negara ini telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang efektif, termasuk kebijakan moneter yang prudent dan intervensi pemerintah dalam mengatur harga-harga kunci, untuk menjaga stabilitas harga, meskipun dalam konteks Indonesia terjadi kenaikan harga bahan makanan yang cukup signifikan selama 2023.

Secara keseluruhan, dinamika inflasi yang berbeda di negara-negara berkembang ini mencerminkan keragaman dalam kondisi ekonomi, kebijakan, dan kemampuan adaptasi masing-masing negara. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dan responsif terhadap kondisi domestik dan eksternal dalam mengelola inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Pada tahun 2024 inflasi global diperkirakan akan menurun yang merupakan buah hasil dari kebijakan moneter ketat, normalisasi harga komoditas, ketersediaan pasokan produksi, dan beragam bauran kebijakan lainnya untuk menurunkan inflasi. Penurunan inflasi diharapkan mampu mengembalikan daya beli masyarakat sehingga mendongkrak perekonomian.

Meski begitu, kondisi ini tidak terlepas dari risiko lonjakan harga yang disebabkan oleh beragam konflik yang terjadi saat ini yaitu konflik di laut merah, Israel – Palestina, dan Rusia – Ukraina. Apabila konflik ini terus berlanjut dan memanas maka berpotensi untuk mendisrupsi rantai pasok global.

Ketegangan geopolitik ini dapat menghambat arus perdagangan akibat terjadinya fragmentasi antar negara. Selain itu, faktor perubahan iklim juga perlu dipertimbangkan dimana dapat mempengaruhi waktu panen sehingga berpotensi untuk meningkatkan inflasi.

1.1.2. Perkembangan Suku Bunga

Dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang tinggi, bank sentral di berbagai negara telah mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan mereka. Kenaikan suku bunga ini diharapkan dapat mendinginkan tekanan inflasi dengan menahan permintaan dan mengurangi tekanan harga. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kenaikan serentak suku bunga acuan oleh sejumlah negara telah membuat likuiditas global relatif surut, memperlambat investasi dan konsumsi, dan meningkatkan biaya pinjaman. Hal ini berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Efek dari pengetatan kebijakan moneter ini juga terasa di negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara berkembang cukup rentan terhadap perubahan kebijakan moneter global, terutama melalui jalur modal masuk/keluar (*capital inflow outflow*) yang berdampak pada volatilitas mata uang mereka. Selain itu, memanasnya suhu politik dunia telah membuat perilaku investor yang lebih berhati-hati. Investasi yang berkurang dan aliran modal yang lebih terbatas ke negara berkembang dapat memperburuk kondisi ekonomi, khususnya perlambatan pertumbuhan. Dalam konteks ini, penting bagi negara berkembang untuk merespons dengan kebijakan ekonomi yang tepat, menyeimbangkan antara agenda pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1 Suku Bunga Acuan Indonesia dan Berbagai Negara Lain, 2023

Negara	Rate	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
Indonesia	Reverse Repo	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	6,00	6,00
Euro Area	Main Refinancing Rate	3,00	3,50	3,50	3,75	4,00	4,25	4,25	4,50	4,50	4,50
Jepang	Short-Term Policy Interest Rate	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
RRC	Key Policy Rate	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
Korea Selatan	Repo Rate	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Malaysia	Policy Rate	2,75	2,75	2,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Australia	Cash Rate	3,35	3,60	3,60	3,85	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,35
Brazil	Selic Interest Rate	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,25	12,75	12,75	12,25

Sumber: Bank Indonesia

Pada tahun 2023, kondisi suku bunga acuan yang ditetapkan oleh berbagai bank sentral masih berada pada level yang tergolong tinggi. Hal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan bank sentral untuk mengendalikan inflasi tinggi di tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, belakangan terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan potensi penurunan suku bunga acuan, sejalan dengan tren inflasi yang terus mereda. Di Amerika Serikat, the Fed telah mempertahankan Federal Funds Rate (FFR) di level 5,5 persen sejak Juli 2023, sebuah tindakan yang diinterpretasikan sebagai sinyal dovish mengenai arah kebijakan moneter ke depan. Sinyal ini diterima sebagai indikasi bahwa the Fed mungkin mempertimbangkan untuk melonggarkan kebijakannya dalam waktu dekat, terutama jika inflasi terus menunjukkan tanda-tanda penurunan yang konsisten.

Meskipun ada harapan akan penurunan suku bunga, masih terdapat perdebatan di kalangan ekonom mengenai waktu dan besarnya penurunan suku bunga acuan, terutama mengingat kondisi inflasi di

AS yang masih berada di atas target 2 persen yang ditetapkan oleh the Fed. Selain itu, pemulihan ekonomi AS yang terjadi lebih kuat dari yang diperkirakan menambah kompleksitas kebijakan. Pemulihan yang kuat ini, sementara merupakan tanda positif dari perspektif pertumbuhan, juga dapat memberikan tekanan inflasioner yang membuat the Fed harus berhati-hati dalam mengubah arah kebijakannya. Namun, potensi penurunan FFR, jika terjadi, akan memberikan dampak positif terhadap ketersediaan likuiditas dan investasi global, terutama di negara berkembang. Penurunan suku bunga di negara maju seperti AS biasanya mendorong aliran modal ke pasar-pasar dengan imbal hasil yang lebih tinggi, memberikan dorongan bagi ekonomi negara berkembang melalui peningkatan investasi asing langsung dan pasar keuangan yang lebih likuid.

Di Eropa, suku bunga acuan tetap bertahan pada angka 4,50 persen. Angka ini mencerminkan kebijakan moneter yang ketat yang diterapkan oleh European Central Bank (ECB) dalam upaya mengendalikan inflasi yang telah meningkat tajam pasca-pandemi. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19, di mana suku bunga berada di sekitar 0 persen, suku bunga acuan saat ini tergolong sangat tinggi. Kenaikan ini menunjukkan betapa agresifnya ECB dalam menangani inflasi tinggi. Pilihan kebijakan ini akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pinjaman, mengingat lonjakan suku bunga akan memperlambat aktivitas ekonomi karena meningkatkan biaya pinjaman, sehingga akan mengerem laju investasi dan konsumsi baik oleh rumah tangga maupun dunia usaha.

Di Tiongkok, situasi pertumbuhan ekonomi domestik yang lemah dan kondisi disinflasi mendorong The People Bank of China (PBOC) melakukan relaksasi kebijakan moneter. Hal ini terlihat dari pemangkasan 7 Days Repo Rate dari 2 persen menjadi 1,8 persen atau menurun sebanyak 20 bps pada tahun 2023. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan penyaluran kredit perbankan sehingga memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Berbanding terbalik dengan situasi di Amerika Serikat, di mana terdapat indikasi penurunan suku bunga pada tahun 2024, Jepang bersiap untuk mengambil langkah kebijakan moneter yang berbeda. Bank Sentral Jepang, Bank of Japan (BoJ), diperkirakan akan meningkatkan suku bunga acuannya. Langkah ini diambil di tengah kondisi inflasi Jepang yang kini berada di atas target 2 persen, setelah sekian lama berjuang melawan rezim inflasi rendah bahkan deflasi.

Indonesia, di sisi lain, mengambil keputusan pada Oktober 2023 untuk meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps, ke angka 6 persen. Langkah ini merupakan bagian pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI untuk merespons tekanan eksternal, terutama akibat fluktuasi

nilai tukar yang telah mengikis cadangan devisa Indonesia dan meningkatkan risiko kemampuan Indonesia dalam membiayai impor dan melunasi utang luar negeri. Peningkatan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia diharapkan dapat menciptakan dampak positif terhadap aliran modal masuk ke Indonesia, stabilitas rupiah dan peningkatan Cadangan devisa. Dengan memperlebar *gap* antara suku bunga Indonesia dengan suku bunga di Amerika Serikat, di mana AS sendiri menunjukkan tanda-tanda penurunan suku bunga pada tahun 2024, BI telah memberikan insentif bagi investor asing untuk menanamkan dananya di Indonesia ketimbang di AS atau negara-negara lain.

Secara umum, terjadi disparitas arah kebijakan bank sentral pada berbagai negara yang menyesuaikan dengan kondisi perekonomiannya. Pada tahun 2023, inflasi secara umum mengalami tren penurunan dan diperkirakan akan secara bertahap menurun pada tahun berikutnya. Maka dari itu, indikasi mengenai penurunan suku bunga acuan di berbagai belahan dunia semakin menguat di tahun 2024. Tekanan inflasioner yang telah mengalami perlambatan menjadi indikasi bank sentral untuk secara bertahap menurunkan suku bunga acuan dan merangsang ekonomi domestik di tengah dinamika ekonomi global yang terjadi. Penurunan suku bunga acuan ini dapat merangsang perekonomian domestik melalui biaya kredit yang menjadi relatif lebih murah.

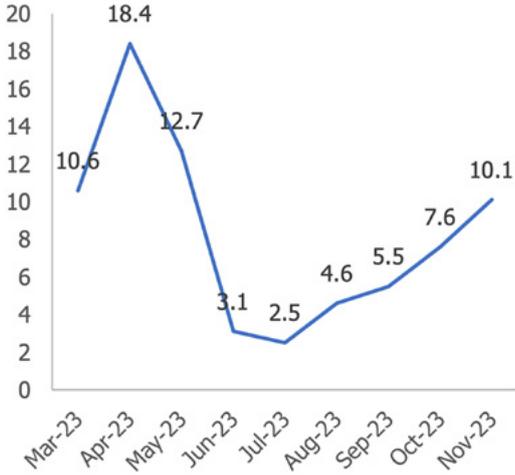
1.2. Kondisi Ekonomi Tiongkok

Biro Statistik Tiongkok mengestimasi pertumbuhan ekonomi negara tersebut tumbuh sebesar 5,20 persen pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi Tiongkok disokong oleh kegiatan di sektor industri yang tumbuh 4,6 persen dan sektor jasa dengan pertumbuhan sebesar 5,8 persen. Sementara itu, kondisi sektor properti tercatat memburuk serta menyeret laju pemulihan ekonomi negara tersebut. Meskipun pemulihan ekonomi Tiongkok membaik pada tahun 2023, negara ini dihadapi oleh bayang-bayang deflasi yang menandakan adanya penurunan *demand* pada pasar domestik. Hal ini juga ditandakan dengan pertumbuhan penjualan retail yang terbatas (Gambar 1.2a)

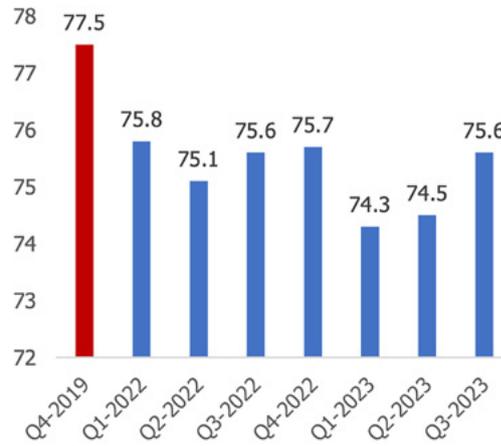
Sektor manufaktur Tiongkok mencatatkan pemulihan, namun kondisi ini belum setara dengan kondisi pra-pandemi. Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) Tiongkok selama tahun 2023 bergerak fluktuatif dengan tren menurun. Index ini mencerminkan kinerja sektor manufaktur. Apabila Index berada di atas 50 persen maka menandakan sektor manufaktur mengalami ekspansi, sebaliknya jika nilai Index di bawah 50 persen menandakan terjadinya kontraksi. Kondisi sektor manufaktur Tiongkok yang belum pulih sepenuhnya juga terlihat dari kapasitas produksi Tiongkok yang masih di bawah level tahun 2019.

Gambar 1.2 Beberapa Indikator Ekonomi Tiongkok

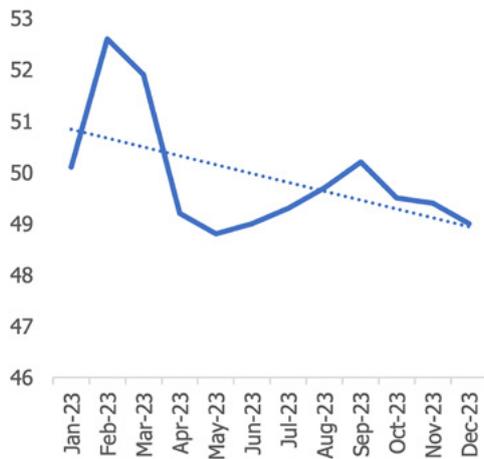
a. Pertumbuhan Penjualan Retail (%yoy)



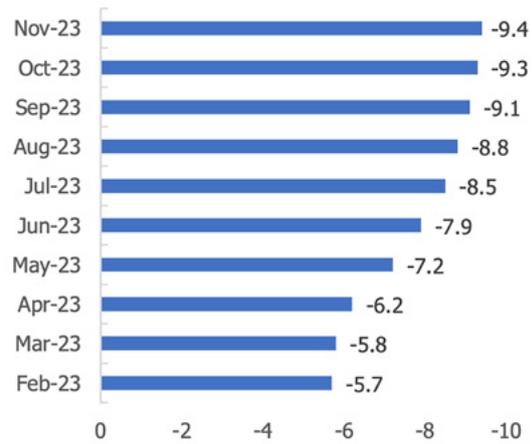
b. Kapasitas Produksi Industri Tiongkok (%)



c. Purchasing Managers' Index, PMI (%)



d. Akumulasi Pertumbuhan Investasi Properti (%)



Sumber: National Bureau Statistics of Tiongkok

Pada tahun 2023, nilai ekspor perdagangan Tiongkok tumbuh tipis sebesar 0,6 persen menjadi 23.772 miliar yuan. Nilai impor mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen menjadi 17.984 miliar yuan. Tiongkok mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 5.788 miliar yuan. Sebagai salah satu raksasa perdagangan dunia, Tiongkok memiliki dependensi terhadap kondisi ekonomi global. Apabila pertumbuhan ekonomi global terus melambat maka pemulihan ekonomi Tiongkok juga ikut melambat yang disebabkan oleh kinerja perdagangan internasional yang lesu. Kondisi ekonomi Eropa yang mendekati resesi memperlambat aliran ekspor Tiongkok ke pasar ini. Terlebih lagi, perdagangan Tiongkok dihadapkan oleh berbagai restriksi perdagangan yang dilakukan Amerika untuk barang-barang asal Tiongkok. Padahal Tiongkok memiliki proporsi perdagangan yang cukup besar pada negara tersebut.

Krisis yang terjadi pada sektor properti menjadi salah satu permasalahan utama bagi lemahnya ekonomi Tiongkok. *Oversupply* serta tingginya utang pada sektor tersebut menjadi pemicunya. Suramnya sektor ini terlihat dari jatuhnya pertumbuhan investasi riil mencapai -9,4 persen pada November 2023. Pasalnya, efek dari krisis ini tidak sebatas pada sektor keuangan tetapi juga menjalar kepada daya beli masyarakat Tiongkok. Investasi properti merupakan instrumen investasi favorit bagi penduduk Tiongkok dikarenakan harga properti yang selalu meningkat. Oleh karenanya, tidak sedikit penduduk Tiongkok yang membeli properti untuk investasi bukan untuk ditempati. Maka dari itu, krisis properti tidak hanya menggerus harga produk tersebut, tetapi juga menggerus nilai aset dari penduduknya.

Peran penting sektor properti dalam ekonomi domestik Tiongkok mendorong pemerintah untuk menyelamatkan keberlangsungan sektor ini. Dalam rangka menstimulus *demand* masyarakat terhadap properti, pemerintah menurunkan persentase *downpayment* menjadi 20 persen untuk masyarakat yang pertama kali memiliki rumah dan 30 persen untuk kepemilikan kedua. Selain itu, suku bunga hipotek juga diturunkan. Dari sisi *supply* yaitu pengembang properti, pemerintah memberikan injeksi sebesar RMB350 miliar melalui program *Pledged Supplementary Lending* (PSL) dimana bank sentral Tiongkok memberikan injeksi kepada bank negara untuk memberikan kredit kepada sektor properti. Inisiatif dukungan baik dari sisi *demand* maupun *supply* belum mampu mengembalikan kinerja sektor properti. Permintaan masih melambat menandakan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kondisi sektor properti di masa yang akan datang. Selain itu, penurunan *demand* ini juga terjadi karena adanya perubahan struktural dari demografi masyarakat Tiongkok dimana terjadinya penurunan pertumbuhan penduduk. Hal ini menandakan bahwa penurunan permintaan pada sektor properti akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Sementara itu, injeksi bank sentral kepada pengembang memang membantu pengembang untuk menyelesaikan proyek – proyek pembangunan. Namun, pengembang di Tiongkok menghadapi tekanan finansial dari tingginya utang di masa lampau. Terlebih, penurunan permintaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada sektor properti memperburuk kinerja keuangan perusahaan properti. Oleh karenanya, mempertimbangkan faktor kepercayaan masyarakat, demografis, dan kondisi finansial pengembang properti, diperkirakan sektor properti tidak akan pulih dalam waktu dekat dan melanjutkan kondisi kontraktif di tahun depan.

Selama tahun 2023, Tiongkok menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi negara tersebut. Pemerintah Tiongkok menerbitkan surat utang senilai RMB1 triliun atau setara dengan 0,8 persen dari PDB untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemulihan, pencegahan, dan mitigasi bencana alam. Tidak hanya itu, insentif fiskal diberikan

kepada sektor swasta dimana diberlakukannya keringanan pajak bagi perusahaan. Sementara itu, bank sentral Tiongkok menurunkan *loan prime rate* sebanyak 20 bps sepanjang tahun 2023. Akomodasi kebijakan moneter ekspansif juga terjadi melalui penurunan rasio giro wajib minimum sebesar 50 bps.

Hanya saja, pengambil kebijakan di Tiongkok menghadapi tantangan untuk memperluas kebijakan akomodatif tersebut. Utang sektor publik yang mencapai 116 persen dari PDB serta melambatnya pertumbuhan penerimaan pemerintah dari penyewaan lahan meningkatkan beban fiskal Tiongkok. Adapun keputusan penurunan suku bunga acuan yang lebih jauh di tengah kebijakan suku bunga tinggi negara – negara lain dapat memicu aliran modal keluar dari negara tersebut.

1.3. Kondisi Ekonomi AS

Perekonomian Amerika tercatat tumbuh 3,3 persen di tahun 2023, melebihi ekspektasi yang didukung oleh melandainya inflasi serta kuatnya pasar tenaga kerja. Selain itu, pulihnya industri juga memberikan efek positif terhadap ekonomi Amerika. Hal ini ditandakan oleh Industrial Production Index yang telah pulih ke level sebelum COVID-19 (Gambar 1.3c). Index ini menggambarkan output produksi dari sektor industri.

Pemulihan ini juga didukung oleh peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran konstruksi, khususnya terkait fasilitas manufaktur. Hal ini terjadi di tengah penerapan kebijakan pro-konstruksi manufaktur, seperti the Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), Inflation Reduction Act (IRA), dan CHIPS Act. Masing-masing dari undang-undang tersebut memberikan dukungan finansial langsung dan insentif pajak untuk proyek konstruksi manufaktur, baik yang bersifat publik maupun swasta. Utamanya, peningkatan investasi paling tinggi untuk konstruksi fasilitas manufaktur di bidang teknologi.

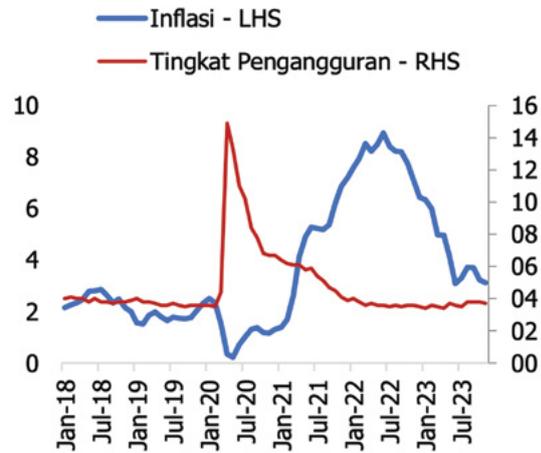
Tingginya FFR berhasil menekan tingkat inflasi ke angka 3,5 persen, jauh lebih rendah dari tingkat inflasi pada Desember 2022 yang mencapai 6,5 persen. Namun, angka ini masih di atas target inflasi the Fed yaitu 2 persen. Secara rinci, inflasi pangan berhasil turun secara signifikan dari 10,4 persen di Desember 2022 menjadi 2,7 persen di akhir tahun ini. Inflasi energi juga berhasil turun ke angka -2,0 persen, jauh lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 7,3 persen.

Gambar 1.3 Indikator Ekonomi Amerika

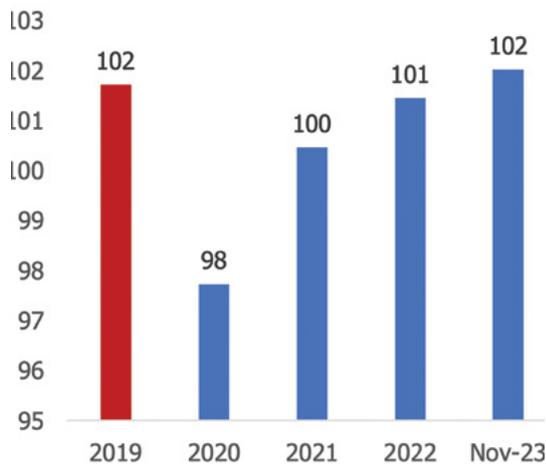
a. Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)



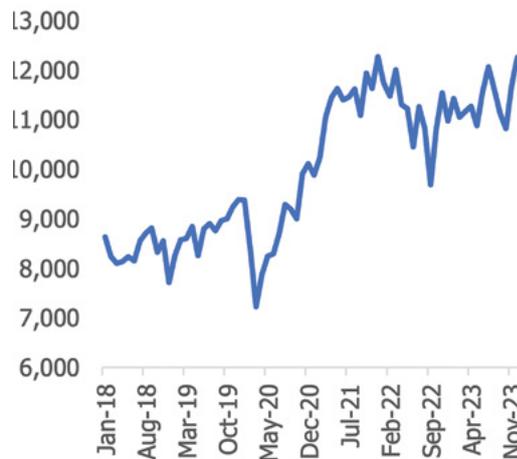
b. Inflasi (% , yoy) dan Tingkat Pengangguran (%)



c. Industrial Production Index



d. Dow Jones US Index



Sumber: FRED

Di sisi lain, inflasi inti berhasil turun ke angka 3,1 persen. Meskipun inflasi tahun 2023 telah menurun, masyarakat Amerika masih merasakan dampak dari kenaikan harga. Hal ini karena, harga – harga tersebut naik signifikan jika dibandingkan sebelum pandemi. Jika data harga pada bulan Desember 2023 dibandingkan dengan bulan Januari 2020, maka harga secara keseluruhan naik 19 persen, harga pangan naik 20 persen, dan harga energi naik 26 persen.

Di tengah inflasi yang melandai, Amerika berhasil menekan tingkat pengangguran yang sempat melejit akibat pandemi ke angka 14,7 persen menjadi 3,7 persen di Desember 2023. Hal ini didukung oleh kuatnya pertumbuhan lapangan kerja baru. Secara rata-rata, terjadi pembukaan lapangan

kerja baru sebanyak 232.000 per bulan dan secara kumulatif terdapat 2,7 juta lapangan kerja baru di tahun 2023. Selain itu, upah riil mulai mengalami peningkatan pada tahun 2023. Pada bulan November 2023, upah riil untuk kategori semua pekerja meningkat 0,8 persen (yoy) sedangkan terjadi peningkatan upah riil sebesar 1,1 persen (yoy) untuk 80 persen pekerja produksi dan *non-supervisory*. Kinerja kuat pasar tenaga kerja diperkirakan akan bertahan pada tahun 2024 yang didukung oleh upaya serikat tenaga kerja.

Pasar keuangan Amerika ditutup dengan kinerja positif. Pergerakan Index Dow Jones cenderung menguat dengan kenaikan secara keseluruhan sebesar 14 persen di tahun 2023 (Gambar 1.3d). Sementara itu Index S&P mengalami kenaikan 24 persen dan Index Nasdaq naik mencapai 43 persen. Di pasar obligasi, US Treasury Bill atau obligasi jangka pendek pemerintah Amerika mengalami tren *yield* yang meningkat sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan the Fed. Tren ini juga berlaku pada *yield* obligasi pemerintah dengan tenor waktu lainnya.

1.4. Kondisi Ekonomi Uni Eropa

Setelah berhasil mengatasi tantangan pandemi dan guncangan harga energi yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina, Uni Eropa menghadapi tugas sulit untuk memulihkan stabilitas harga sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pada tahun 2023 secara bertahap Uni Eropa berhasil mengendalikan inflasinya hingga menurun ke level 3,4 di Desember 2023. Angka ini jauh lebih rendah dari Desember 2022 yang mencapai 10,4 persen. Tingkat inflasi terendah tercatat di Denmark (0,4 persen), Italia dan Belgia (keduanya 0,5 persen). Sedangkan, tingkat inflasi tertinggi tercatat di Ceko (7,6%), Rumania (7,0%) dan Slovakia (6,6%).

Tren inflasi yang menurun pada wilayah ini utamanya dikontribusikan dari inflasi energi yang menurun. Tercatat pada Desember 2023, inflasi energi sebesar -6,1 persen, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 25,5 persen. Inflasi energi merupakan pemicu utama dari peningkatan inflasi di Uni Eropa selama tahun 2021 - 2022, sehingga penurunan harga energi secara signifikan menekan inflasi Uni Eropa. Inflasi energi yang menurun disebabkan oleh harga energi global yang juga menurun serta kecukupan pasokan energi pada Uni Eropa. Meskipun turunnya inflasi energi mempengaruhi moderasi inflasi Uni Eropa, namun level inflasi saat ini tetap di atas target inflasi 2 persen dari bank sentral. Inflasi pangan yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 6,1 persen menjadi tantangan untuk menurunkan inflasi pada wilayah ini.

Menurunnya inflasi memberikan sedikit keringanan kepada rumah tangga dan perusahaan. Hanya saja, dampak guncangan harga dari tahun lalu hingga pertengahan tahun ini dan kebijakan moneter yang lebih ketat berkontribusi telah berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi Uni Eropa. Resesi membayangi ekonomi negara ini setelah pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal berturut-turut mendekati nol persen. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada Q2-2023 sebesar 0,5 persen (yoy), sedangkan ekonomi Uni Eropa tidak tumbuh di Q3-2023.

Negara-negara dengan ekonomi yang intensif pada sektor manufaktur mengalami pukulan ekonomi yang cukup besar ditahun 2023. Jerman sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen. Kontraksi pada sektor manufaktur juga terlihat dari Industrial Production Index yang cenderung menurun dari 2022 hingga 2023 (Gambar 1.4d). Adapun perlambatan pada sektor ini utamanya disebabkan oleh lesunya permintaan global serta ketatnya kondisi keuangan di Uni Eropa.

Di sisi lain, negara-negara yang lebih bergantung pada sektor jasa dan pariwisata memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik. Hal ini didukung oleh meningkatnya aktivitas pariwisata pasca pandemi COVID-19. Tercatat perekonomian Italia tumbuh 0,5 persen (yoy), Spanyol sebesar 2,0 persen (yoy), dan Portugal sebesar 2,2 persen (yoy).

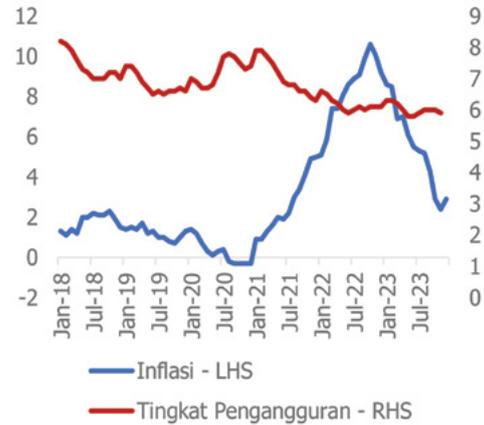
Tingkat pengangguran berhasil turun tipis dari 6,1 persen di Desember 2022 menjadi 5,9 persen di akhir tahun ini. Mencatatkan rekor tingkat pengangguran terendah sejak pasar tenaga kerja di pantau oleh Uni Eropa. Meskipun wilayah tersebut mengalami stagnasi ekonomi pada tahun ini, Uni Eropa mengalami kekurangan tenaga kerja baik *low skilled* maupun *high skilled worker*. Kekurangan ini kemungkinan akan meningkat seiring dengan proyeksi penurunan populasi usia kerja dari 265 juta pada tahun 2022 menjadi 258 juta pada tahun 2030.

Gambar 1.4 Indikator Ekonomi Uni Eropa

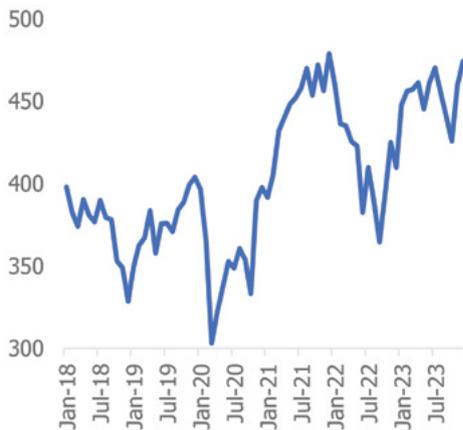
a. Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)



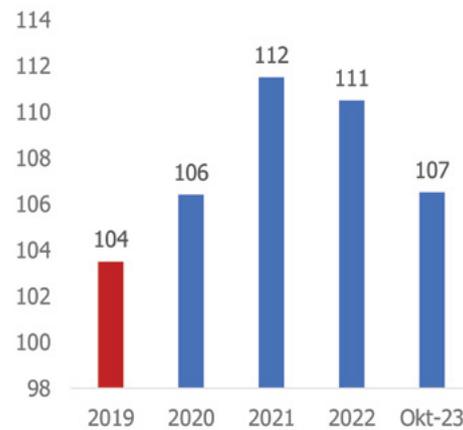
b. Inflasi dan Tingkat Pengangguran (%)



c. Dow Jones Euro Stoxx 50 Index



d. Industrial Production Index



Sumber: Eurostat

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa diperkirakan tumbuh terbatas disebabkan oleh gejolak eksternal yaitu tensi geopolitik pada timur tengah yang memanas serta perekonomian Tiongkok yang masih mengalami tantangan dalam pemulihan. Kedua kejadian ini dapat memberikan tekanan terhadap rantai pasokan yang berakibat pada terganggunya proses produksi dan mendorong inflasi. Selain itu, fenomena El-Nino yang berlanjut memberikan ancaman terjadinya peningkatan inflasi pangan global dan bertransmisi kepada tingkat inflasi Uni Eropa.

1.5. Kondisi Ekonomi Jepang

Pada Desember 2023, inflasi Jepang tercatat di angka 2,6 persen. Meskipun demikian, angka ini tetap berada di atas target inflasi yang ditetapkan oleh Bank of Japan (BOJ) sebesar 2 persen. BOJ memiliki harapan bahwa Jepang mampu menjaga inflasinya di kisaran 2 persen, terutama setelah menghadapi periode inflasi rendah mendekati nol dalam beberapa tahun belakangan, bahkan sempat minus selama periode COVID-19. Di tengah upaya memerangi periode yang hilang “*the lost decades*” semenjak awal 1990-an hingga kini, pencapaian inflasi di kisaran 2 persen ini menjadi indikasi positif bagi BOJ untuk mengakhiri rezim kebijakan moneter longgar.

Jepang berhasil menjaga tingkat penganggurannya di kisaran 2 persen selama tahun 2023. Tercatat, tingkat pengangguran Jepang pada Desember 2023 sebesar 2,4 persen, lebih rendah 0,1 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan, rasio ketersediaan lapangan kerja sebesar 1,27 yang artinya terdapat 127 ketersediaan lapangan kerja untuk setiap 100 pencari kerja. Namun, kenaikan upah yang cukup kaku di negara ini menyebabkan upah riil tergerus di tengah lonjakan inflasi.

Di sisi lain, otoritas Jepang dihadapkan oleh dilema dimana kinerja ekonomi cenderung melemah di tahun ini. Stimulus fiskal oleh pemerintah Jepang serta *ultra loose monetary policy* dari BOJ, belum bisa mencegah kontraksi ekonomi Jepang. Bauran kebijakan yang dilakukan diharapkan bisa mendorong konsumsi domestik namun, sebaran populasi Jepang yang semakin condong ke usia tua menyebabkan sulit bagi negara tersebut untuk mendorong konsumsi. Di satu sisi, tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi dari kondisi umum juga memberikan beban terhadap daya beli masyarakat. Tercatat per Desember 2023, konsumsi rumah tangga Jepang mengalami kontraksi sebesar 2,9 persen.

Kontraksi juga terjadi di sektor manufaktur yang tercermin dari Industrial Production Index sektor manufaktur yang mengalami tren menurun. Index tersebut menggambarkan volume output dari industri manufaktur relatif terhadap tahun dasar. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh ketidakpastian sektor eksternal dimana melemahnya ekonomi sejumlah negara mitra dagang Jepang seperti Tiongkok dan Eropa serta memanasnya tensi geopolitik global.

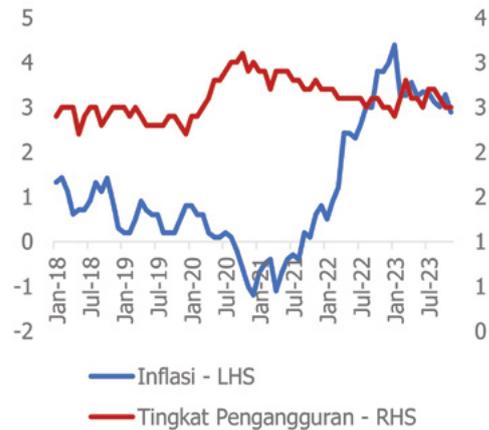
Index Nikkei 225 Jepang mencatatkan rekor sebagai pasar dengan kinerja terbaik di Asia pada tahun 2023, setelah mengalami kenaikan sebesar 28 persen tahun ini. Kinerja positif pada pasar saham Jepang didukung oleh depresiasi yen sebesar 6,4 persen terhadap USD selama tahun 2023. Peningkatan minat investor asing juga menjadi pendukung dari kinerja positif Index Nikkei 225, khususnya setelah pandangan positif Warren Buffet terhadap ekuitas Perusahaan Jepang.

Gambar 1.5 Indikator Ekonomi Jepang

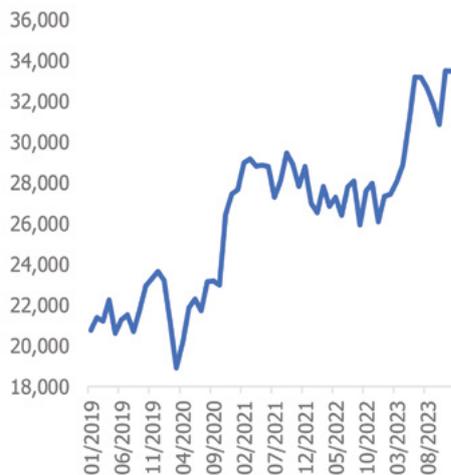
a. Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)



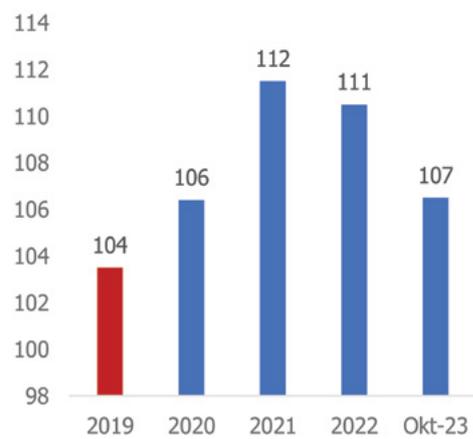
b. Inflasi (% , yoy) dan Tingkat Pengangguran (%)



c. Nikkei 225 Index



d. Industrial Production Index



Sumber: Statistics Bureau of Japan

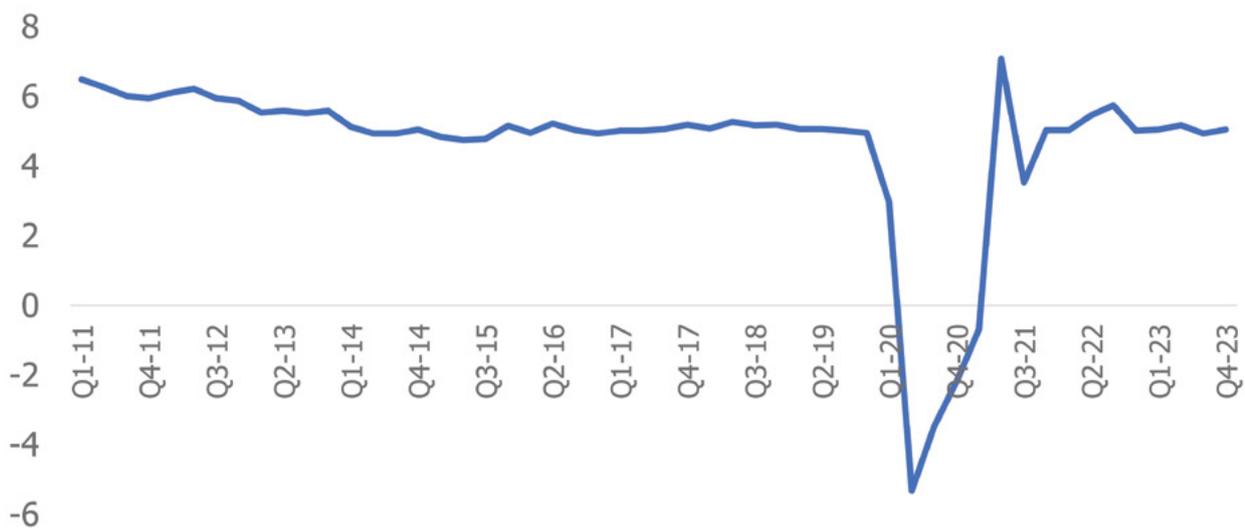
Perekonomian Domestik: Tumbuh Stagnan



2. PEREKONOMIAN DOMESTIK: TUMBUH STAGNAN

Pada triwulan ketiga tahun 2023, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp5.296,0 triliun berdasarkan harga berlaku atau Rp3.124,9 triliun dalam harga konstan 2010. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang negeri ini. Selain itu, angka PDB yang mencapai rekor tertinggi ini juga mencerminkan kuatnya fondasi perekonomian Indonesia serta berbagai kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan yang perlu diatasi seperti ketidakpastian global masih terus menghantui, menjadi perhatian utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif ini.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Ekonomi Indonesia triwulan III-2023 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen (yoy). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,74 persen. Hal ini ditopang keberhasilan pemulihan ekonomi yang cepat pasca pandemi COVID-19.

Tabel 2.1 Pertumbuhan dan Proporsi PDB Indonesia Berdasarkan Pengeluaran 2020-2023

Komponen	Growth 2020 (% , yoy)	Growth 2021 (% , yoy)	Growth 2022 (% , yoy)	Growth 2023 (% , yoy)	Share 2020 (% GDP)	Share 2021 (% GDP)	Share 2022 (% GDP)	Share 2023 (% GDP)
GDP	-2,1	3,7	5,3	5,0	100	100	100	100
Konsumsi Rumah Tangga (C)	-2,6	2,0	4,9	4,8	57,6	54,4	51,9	53,1
Pengeluaran Pemerintah (G)	2,1	4,2	-4,5	2,9	9,7	9,3	7,7	7,4
Investasi (I)	-5,0	3,8	3,9	4,4	31,7	30,8	29,1	29,3
Expor (X)	-8,4	17,9	16,3	1,3	17,3	21,4	24,5	21,7
Impor (M)	-17,6	24,9	14,75	-1,6	15,6	18,8	20,9	19,6

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sektor transportasi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan di tengah kembali normalnya aktivitas ekonomi. Hal ini mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan transportasi dan pariwisata di Indonesia. Kenaikan pengiriman logistik barang (melalui *channel ecommerce*) turut menstimulus pertumbuhan positif sektor transportasi. Selain itu, adaptasi teknologi digital dan *platform online* di industri transportasi semakin mendorong perkembangannya pasca pandemi. Maraknya layanan *ride-hailing*, pengiriman *e-commerce*, dan metode pembayaran nirsentuh menjadi semakin lazim dilakukan, memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis yang terus berkembang di masa normal baru.

Selain itu, inisiatif pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui proyek infrastruktur dan insentif bagi dunia usaha, juga memainkan peran penting. Proyek pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan transportasi karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi dan konektivitas jaringan transportasi secara keseluruhan. Hal ini pada gilirannya berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor transportasi.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor (% , yoy)

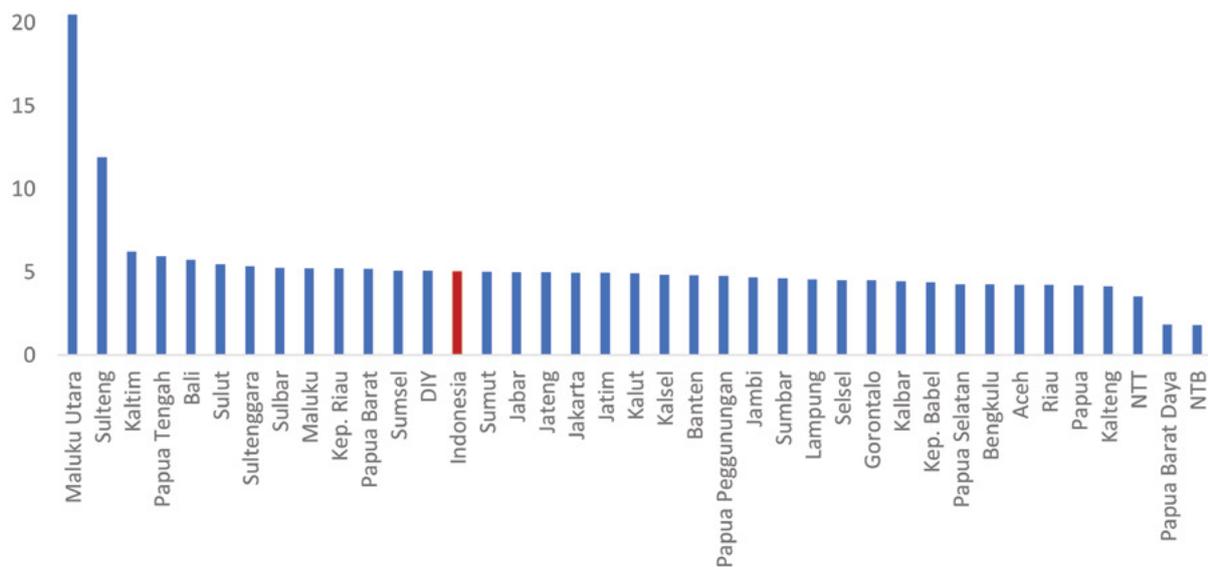
Laju Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor (yoy)	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,6	1,7	1,9	2,2	1,3
B. Pertambangan dan Penggalian	1,2	-1,9	4,0	4,4	6,1
C. Industri Pengolahan	3,8	-2,9	3,4	4,9	4,6
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,0	-2,3	5,5	6,6	4,9
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,8	4,9	4,9	3,2	4,9
F. Konstruksi	5,8	-3,3	2,8	2,0	4,9
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,6	-3,8	4,6	5,5	4,8
H. Transportasi dan Pergudangan	6,9	-15,0	3,2	19,9	13,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	-10,3	3,9	11,9	10,0
J. Informasi dan Komunikasi	9,4	10,6	6,8	7,7	7,6
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,6	3,2	1,6	1,9	4,8
L. Properti	5,8	2,3	2,7	1,7	1,4
M,N. Jasa Perusahaan	10,2	-5,4	0,7	8,8	8,2
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,6	-0,0	-0,3	2,5	1,5
P. Jasa Pendidikan	6,3	2,6	0,1	0,6	1,9
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,7	11,5	10,4	2,7	4,7
R,S,T,U. Jasa lainnya	10,6	-4,1	2,1	9,5	10,5

Sumber: Badan Pusat Statistik

Seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan dan implementasi program vaksinasi secara masif berdampak pada peningkatan pariwisata domestik dan mancanegara. Alhasil, ini berkontribusi terhadap peningkatan permintaan terhadap berbagai moda transportasi serta industri makanan minuman. Maskapai penerbangan, angkutan umum, dan perhotelan lokal mengalami peningkatan seiring dengan kembalinya masyarakat untuk melakukan perjalanan baik untuk keperluan bisnis maupun wisata. Revitalisasi sektor transportasi di Indonesia pasca pandemi dapat dikaitkan

dengan pemulihan ekonomi secara keseluruhan, dukungan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, integrasi teknologi digital, dan kembalinya perjalanan dan aktivitas sehari-hari ke keadaan normal secara bertahap.

Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi di Kawasan timur Indonesia melebihi rata-rata nasional, terutama didorong oleh upaya hilirisasi pertambangan. Pada tahun 2023, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Setelah berhasil menghentikan ekspor bijih nikel beberapa tahun yang lalu, kali ini pemerintah berencana untuk menghentikan ekspor mineral mentah lainnya seperti bijih bauksit dan timah. Pemerintah percaya bahwa hilirisasi komoditas mineral mentah di dalam negeri memiliki peran yang sangat besar. Hal ini karena nilai tambah dari produk tersebut bisa menjadi berkali-kali lipat dan hilirisasi sumber daya alam dapat menjadi cara efektif bagi Indonesia untuk menjadi Negara Maju.

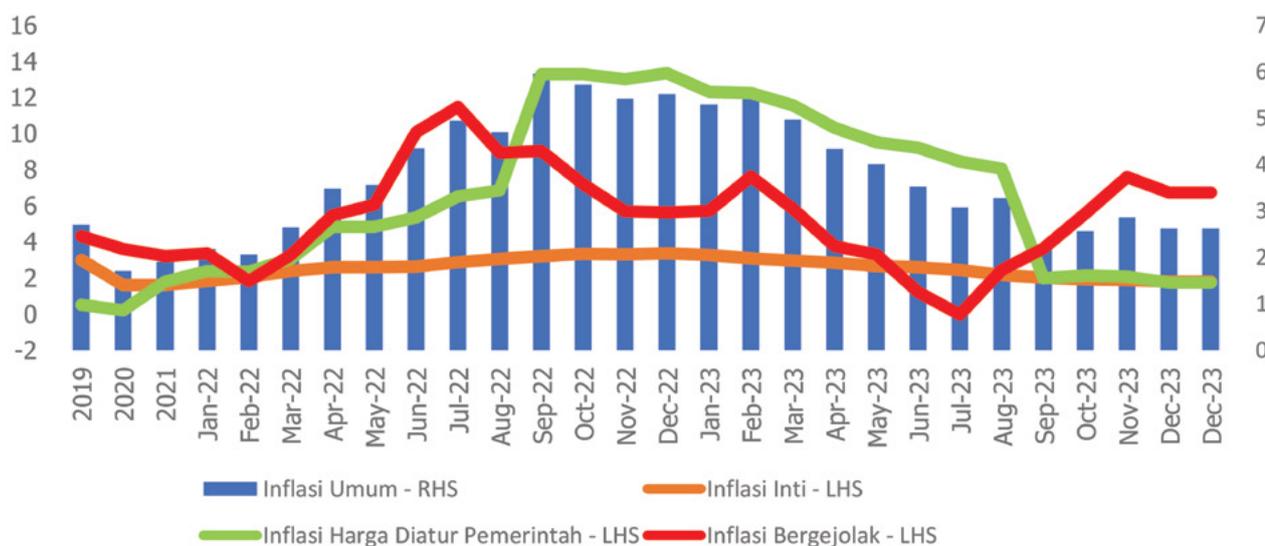
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah merumuskan peta jalan hilirisasi di Indonesia hingga tahun 2040. Salah satu aspek dari peta jalan ini adalah bahwa hilirisasi membutuhkan investasi hingga USD545,3 miliar atau sekitar Rp8.200 triliun dengan kurs Rp15.200/USD sampai tahun 2040. Ada 21 komoditas yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dilakukan hilirisasi, termasuk batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, kepiting, rumput laut, dan garam. Melalui hilirisasi, potensi yang ada dapat dimaksimalkan dan mendorong Indonesia untuk

memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Dengan adanya hilirisasi, ekspor juga dapat meningkat karena Indonesia dapat memproduksi produk dengan nilai tambah yang tinggi. Alhasil, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia juga akan ikut terkerek sehingga tingkat pengangguran dan juga kemiskinan dapat ditekan.

2.1. Inflasi

Inflasi Indonesia pada 2023 melandai seiring dengan turunnya harga-harga yang diatur pemerintah (*administered prices*). Inflasi Komponen Harga yang Diatur oleh Pemerintah (*administered prices*) adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan sejenisnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas harga BBM, tarif Listrik, dan barang yang diatur pemerintah lainnya untuk menjaga daya beli Masyarakat. *Administered price* juga dapat mengindikasikan efisiensi birokrasi, regulasi, dan prosedur administratif pemerintahan. Alhasil, biaya administrasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administratif, serta kompleksitas regulasi pemerintah dapat ditekan. Administratif inflasi pemerintah dapat menghambat efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan beban biaya bagi masyarakat dan bisnis.

Gambar 2.3 Inflasi Indonesia 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Di sisi lain, inflasi harga bergejolak (*volatile food*) melonjak signifikan. Inflasi Komponen Bergejolak (*volatile food*) merupakan inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok

bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Hal ini didorong oleh kenaikan harga pangan sejak pertengahan 2023 khususnya harga beras dan gula.

Inflasi pangan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersama-sama menyebabkan harga-harga makanan pokok tetap tinggi. Salah satu faktor penting adalah ketergantungan berat negara ini pada impor makanan, terutama untuk bahan makanan utama seperti beras dan kedelai. Fluktuasi harga global dan perubahan kondisi perdagangan internasional dapat langsung memengaruhi biaya makanan impor, membuatnya rentan terhadap tekanan inflasi.

Tabel 2.3 Perubahan harga pangan 2023 (mtm)

Komoditas (% , mtm)	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Beras	1,4%	3,3%	0,9%	-0,4%	-0,5%	0,5%	0,9%	1,3%	7,5%	2,0%	0,4%
Daging Ayam	-7,9%	-2,2%	2,9%	1,6%	11,9%	1,2%	-4,1%	-4,7%	-3,6%	3,7%	-4,1%
Daging Sapi	0,8%	-0,6%	1,4%	1,6%	-0,2%	-0,8%	-0,3%	-0,3%	-0,5%	-0,8%	-0,7%
Telur Ayam	-3,1%	-5,3%	9,5%	0,4%	3,1%	-1,4%	1,8%	-1,8%	-7,2%	-1,9%	1,6%
Bawang Merah	0,7%	-3,3%	-5,0%	-0,6%	4,9%	0,4%	-9,2%	-21,0%	-16,1%	-4,2%	28,1%
Bawang Putih	13,7%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	9,6%	14,1%	-18,8%	-0,4%	6,5%	-2,0%
Cabai Merah	5,0%	14,6%	9,1%	-14,9%	-5,1%	9,7%	3,2%	6,6%	-12,5%	12,9%	54,6%
Cabai Rawit	8,5%	-0,9%	19,9%	-29,1%	-18,4%	12,6%	-0,5%	10,4%	-16,8%	40,7%	48,7%
Minyak Goreng	4,7%	-1,0%	1,0%	-0,6%	0,6%	-1,6%	-0,3%	-1,0%	-0,3%	-0,3%	0,7%
Gula Pasir	1,6%	0,4%	0,4%	0,0%	0,8%	-0,4%	0,8%	0,4%	4,2%	3,3%	6,7%

Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah oleh Tim Ekonom PERBANAS

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan pangan Indonesia pada tahun 2023 mencapai USD13,8 miliar atau sekitar Rp215,77 triliun (USD1=Rp15.635), mengalami peningkatan sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2022. Komoditas beras menjadi sorotan utama dengan lonjakan nilai impor mencapai 785,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Volume impor beras juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 3,06 juta ton pada tahun 2023, naik 613,6% dari tahun 2022 yang mencatatkan 429.207 ton. Thailand menjadi penyumbang impor beras terbesar dengan 1,38 juta ton, diikuti oleh Vietnam dengan 1,15 juta ton. Sementara itu, impor gandum terbesar berasal dari Australia, Kanada, dan Rusia.

Gangguan rantai pasokan dapat memperparah situasi tersebut. Masalah seperti tantangan transportasi, masalah penyimpanan, dan bencana alam dapat menyebabkan kelangkaan beberapa jenis makanan, menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Ketika permintaan melebihi pasokan yang tersedia, harga cenderung naik, berkontribusi pada inflasi pangan secara keseluruhan.

Kerentanan Indonesia terhadap tantangan terkait cuaca menambah kompleksitas masalah. Banjir, kekeringan, dan peristiwa cuaca ekstrem lainnya dapat merugikan produksi pertanian, mengakibatkan hasil yang lebih rendah dan akhirnya harga makanan yang lebih tinggi. Gangguan terkait iklim ini menciptakan sumber tambahan ketidakstabilan dalam rantai pasokan makanan.

Kenaikan biaya produksi, yang melibatkan faktor seperti kenaikan harga bahan bakar, biaya tenaga kerja, dan biaya yang terkait dengan pupuk, juga dapat berkontribusi pada kenaikan harga makanan yang diproduksi di dalam negeri. Ketika biaya produksi ini naik, produsen mungkin menyalurkan biaya tambahan tersebut kepada konsumen, memperburuk inflasi pangan. Harga komoditas global juga memainkan peran penting dalam inflasi pangan Indonesia. Fluktuasi harga komoditas seperti minyak langsung memengaruhi biaya transportasi dan biaya produksi secara keseluruhan, mempengaruhi harga berbagai produk makanan di pasar.

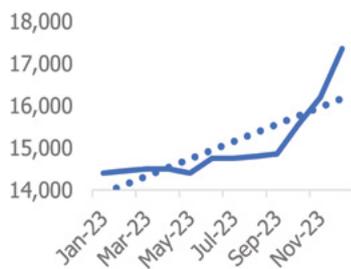
Dampak pertumbuhan penduduk juga tidak bisa diabaikan. Pertumbuhan penduduk yang cepat di Indonesia mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi terhadap makanan, menempatkan tekanan pada keseimbangan pasokan dan permintaan. Jika produksi pertanian tidak dapat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sebagaimana diprediksi oleh Malthus, hal ini dapat menyebabkan krisis pangan. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa penurunan jumlah warga yang terlibat dalam sektor pertanian dan menyusutnya lahan pertanian. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) mencapai 29.342.202 unit, mengalami penurunan

sebesar 7,45% dari tahun 2013 yang mencatatkan 31.705.295 unit. Tantangan lain adalah kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani di Indonesia yang menambah kompleksitas masalah sisi produksi sektor ini.

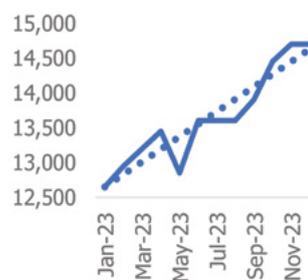
Mengatasi tantangan inflasi pangan yang tinggi di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif. Dalam jangka pendek kebijakan seperti subsidi dan kontrol harga dapat diterapkan. Dalam jangka menengah-panjang, kebijakan yang lebih struktural seperti peningkatan produktivitas pertanian dalam negeri, memperbaiki infrastruktur, dan efisiensi rantai pasok mesti menjadi prioritas.

Gambar 2.4 Harga Pangan 2023 (Rp)

a Gula Pasir Lokal



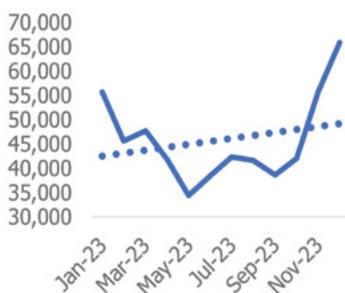
b Beras Medium



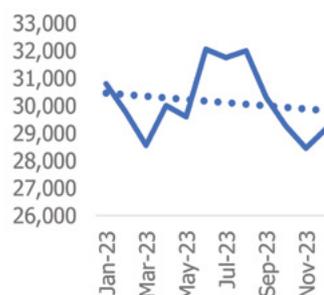
c Cabe Keriting



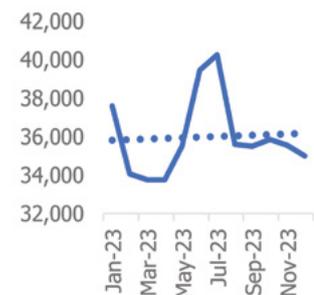
d Cabe Rawit Hijau



e Telur Ayam



f Daging Ayam



Sumber: Kementerian Perdagangan

2.2. Nilai Tukar

Secara umum, selama tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini, rupiah mengalami tekanan dan terus mengalami pelemahan nilai. Data ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia, baik dari dalam negeri maupun faktor eksternal. Fluktuasi nilai rupiah Indonesia terhadap mata uang lain mempengaruhi biaya barang impor, termasuk bahan pangan dapat berujung

pada pelemahan daya beli masyarakat. Selain itu, fluktuasi rupiah yang berlebihan juga dapat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan khususnya melalui jalur utang dan aset dalam mata uang asing, yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah yang memiliki kewajiban atau aset dalam mata uang tersebut. Perubahan tiba-tiba dalam nilai tukar dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan kebangkrutan bagi sebuah entitas jika tidak mempersiapkan diri dengan baik.

Tabel 2.4 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Beberapa Mata Uang (%mom)

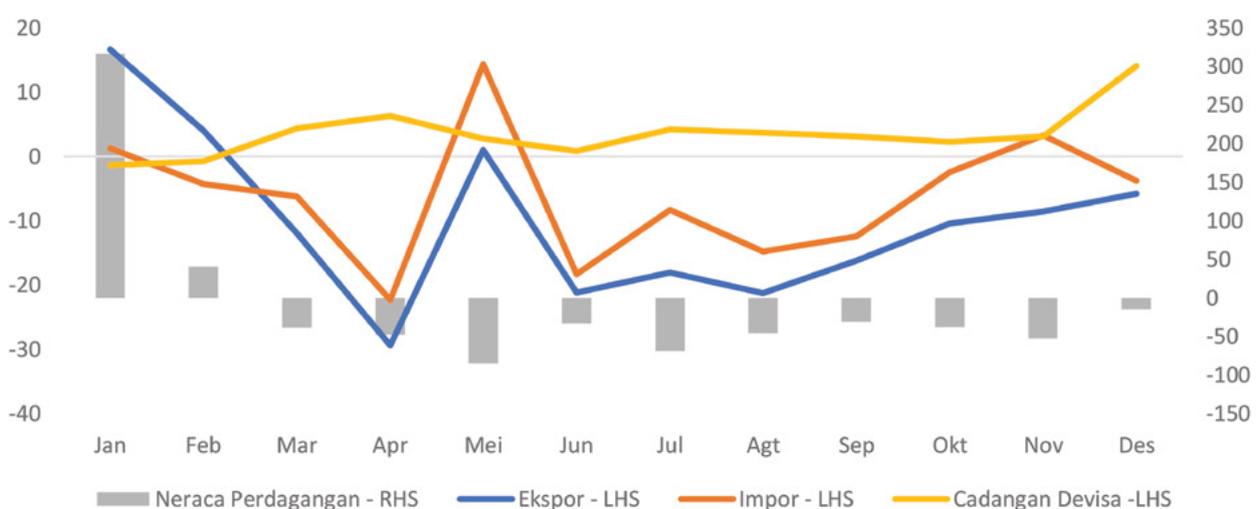
Tanggal	USD/IDR (%,mom)	GBP/IDR (%,mom)	EUR/ IDR(%,mom)	CNY/ UDR(%,mom)	Yen/ IDR(%,mom)
Dec-23	-0,2	-1,1	-1,4	-0,5	-4,9
Nov-23	3,3	-1,5	-0,6	0,7	1,9
Oct-23	-2,5	-2,1	-2,4	-2,4	-2,2
Sep-23	-1,9	2,1	0,8	-1,7	-0,1
Aug-23	-1,0	0,1	-0,1	0,8	3,5
Jul-23	-0,4	-0,7	-0,9	-1,4	-2,8
Jun-23	-0,4	-3,5	-2,3	1,6	1,7
May-23	-1,5	-0,6	1,8	0,9	3,2
Apr-23	2,1	1,2	0,3	2,7	3,0
Mar-23	1,4	-1,8	-1,4	0,1	-1,3
Feb-23	-2,0	1,4	1,0	1,2	2,8
Jan-23	4,8	2,0	2,5	1,7	1,8
Dec-22	0,0	0,1	-2,4	-2,8	-3,2
Nov-22	-1,3	-5,9	-5,6	-2,4	-7,8
Oct-22	-1,9	-8,9	-5,1	-1,4	-0,3
Sep-22	-2,5	5,8	1,3	1,7	1,9
Aug-22	0,6	4,2	2,3	3,0	2,6
Jul-22	-0,7	-0,8	2,2	-0,1	-1,2
Jun-22	-2,1	1,6	0,3	-1,5	4,6
May-22	-0,9	-1,6	-2,5	0,7	-1,4
Apr-22	-0,5	4,1	4,6	2,7	4,5
Mar-22	0,2	2,5	0,9	0,6	5,9
Feb-22	0,1	-0,6	-0,8	-0,5	-0,7
Jan-22	-0,8	-0,2	0,7	-1,1	-0,5

Sumber: CEIC, diolah oleh Tim Ekonom PERBANAS

Depresiasi nilai mata uang seperti Rupiah Indonesia juga dipicu oleh kenaikan suku bunga the Fed. Ketika the Fed meningkatkan suku bunga, kebijakan ini akan menarik modal asing ke Amerika Serikat untuk mencari imbal hasil lebih tinggi. Konsekuensinya, hal ini mengakibatkan aliran modal keluar dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia menuju ke negara-negara yang menaikkan suku bunganya. Aliran modal keluar ini kemudian memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Tekanan ini bertambah jika persepsi risiko investor terhadap rupiah relatif meningkat dibandingkan mata uang utama seperti Dolar AS sehingga investor akan memindahkan dananya ke aset yang lebih aman, berkontribusi pada depresiasi lanjutan pada Rupiah.

Selama tahun 2023, Indonesia menghadapi tantangan dengan neraca perdagangan yang mengalami defisit, yang kemudian diikuti oleh pelemahan nilai tukar Rupiah. Jika Indonesia mengalami defisit perdagangan, yang berarti lebih banyak impor daripada ekspor, kondisi ini dapat menambah tekanan pada Rupiah. Defisit perdagangan membutuhkan pendanaan, dan jika investor asing melihat kerentanannya atau ketidakpastian ekonomi, semakin menurun pula keinginan mereka untuk menyimpan Rupiah. Dalam upaya untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar, Bank Indonesia aktif melakukan intervensi di pasar uang, yang tercermin dari tren penurunan cadangan devisa Indonesia. Intervensi ini menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mencegah potensi dampak negatifnya terhadap ekonomi domestik.

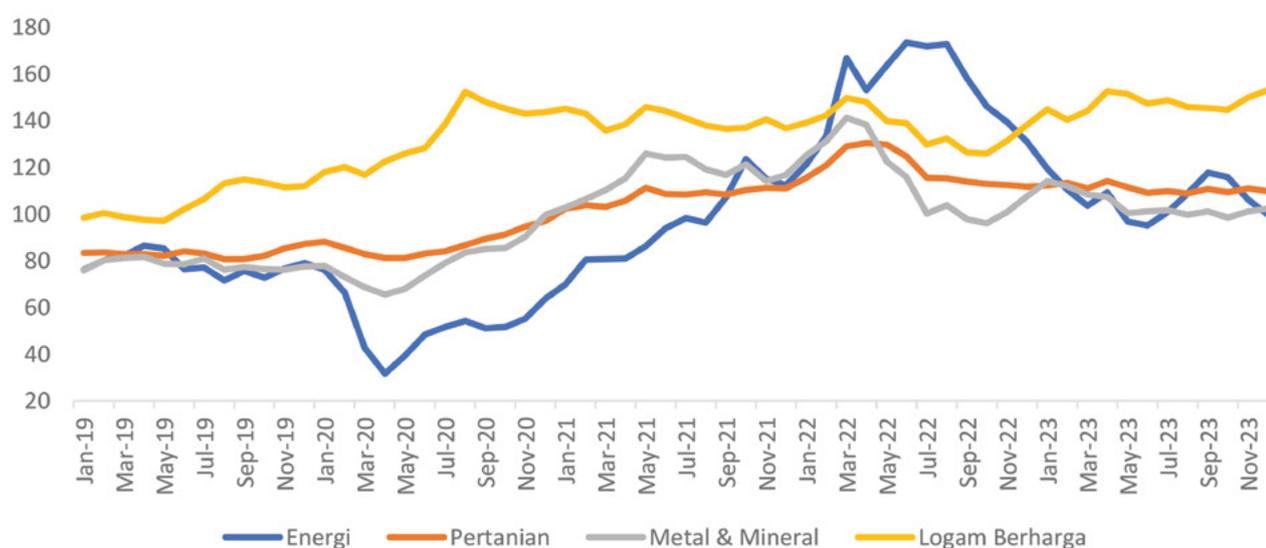
Gambar 2.5 Perubahan Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 2023 (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi ekspor, komoditas alam masih menjadi andalan Indonesia. Kenaikan sejumlah harga komoditas selama tahun 2020–2022 memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Namun, harga komoditas pada pertengahan 2022 cenderung mengalami tren menurun atau kembali ke harga normal (Gambar 2.6). Hal ini memengaruhi level neraca perdagangan dan cadangan devisa Indonesia yang ikut menurun. Gambar 2.5 menunjukkan bahwa pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia melambat seiring dengan harga komoditas yang mengalami tren harga menurun. Akibatnya, pertumbuhan cadangan devisa Indonesia melambat, menjadi tantangan bagi bank sentral untuk stabilitas nilai tukar rupiah yang terdepresiasi.

Gambar 2.6 Index Harga Komoditas Global



Sumber: World Bank

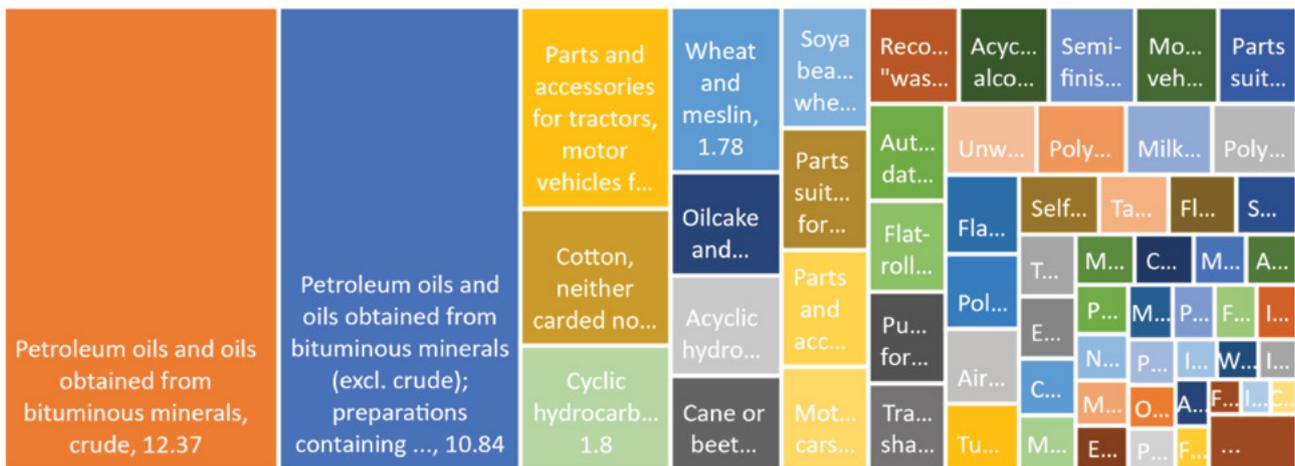
Dalam dua dekade terakhir, minyak bumi selalu menjadi komoditas yang paling tinggi di impor oleh Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara produsen minyak bumi, hanya saja kebutuhan domestik yang meningkat untuk mendorong perekonomian menyebabkan ketersediaan minyak bumi domestik tidak mencukupi besarnya permintaan domestik. Oleh karenanya, komoditas ini selalu memiliki proporsi yang besar dalam nilai impor Indonesia.

Indonesia pernah menjadi bagian dari OPEC serta berperan sebagai *net-oil exporter* hanya saja, sejak tahun 2008 Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari OPEC karena tambang minyak yang menua dan kurangnya penemuan tambang minyak baru untuk memiliki cadangan minyak yang besar. Alhasil, kesenjangan antara ketersediaan minyak domestik dengan permintaan semakin besar sehingga perlu diisi oleh impor.

Kedua, meningkatnya permintaan konsumsi minyak bumi dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh pertumbuhan yang signifikan dalam populasi penduduk Indonesia dan industrialisasi. Minyak bumi diperlukan dalam berbagai sektor sebagai sumber energi yang mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Konsumsi energi yang berasal dari minyak bumi masih menjadi pilihan utama bagi Indonesia, sedangkan alternatif energi lainnya khususnya energi baru terbarukan (EBT) masih sangat terbatas perkembangannya.

Gambar 2.7 Proporsi Komoditas Impor Indonesia 2003 vs 2023

a. Proporsi Komoditas Impor Indonesia 2003 (%)



b. Proporsi Komoditas Impor Indonesia 2023 (%)



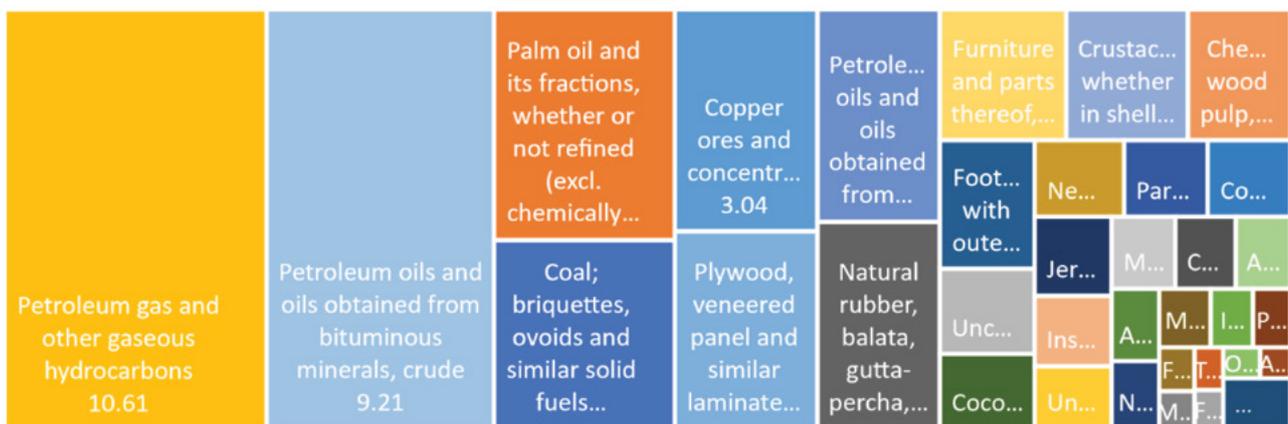
Sumber: Trade Map

Produktivitas kilang minyak Indonesia juga mesti ditingkatkan. Fasilitas pengolahan minyak bumi Indonesia relatif tertinggal dari negara-negara lainnya. Kurangnya penggunaan teknologi baru menyebabkan produk turunan minyak bumi Indonesia terbatas. Alhasil, nilai ekspor minyak

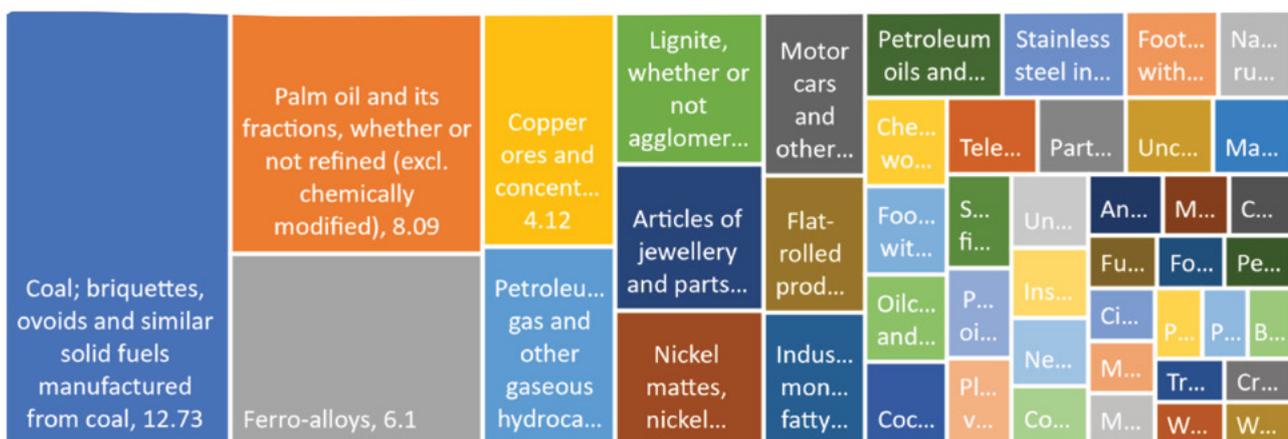
Indonesia menjadi kurang optimal, sedangkan kita mesti mengimpor kembali minyak bumi yang sesuai dengan kebutuhan pasar domestik. Terjadi perubahan yang cukup struktural pada komoditas ekspor Indonesia dalam dua dekade terakhir, yang mulanya terbesar adalah O&G (2003) menjadi batu bara (2022). Pada awal tahun 2000-an, ketergantungan Indonesia pada ekspor minyak dan gas disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, strategis, dan pembangunan.

Gambar 2.8 Proporsi Komoditas Ekspor Indonesia 2003 vs 2023

a. Proporsi Komoditas Ekspor Indonesia 2003 (%)



b. Proporsi Komoditas Ekspor Indonesia 2023 (%)



Sumber: Trade Map

Pada masa kejayaannya, migas memainkan peran penting dalam mendanai proyek-proyek berskala besar yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur negara dan mendorong kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, ekspor sumber daya ini menjadi sangat diperlukan untuk mendanai agenda pembangunan yang ambisius. Selain itu, ekspor migas juga menjadi sumber utama perolehan

devisa bagi Indonesia. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor ini membantu menstabilkan neraca pembayaran negara, memfasilitasi perolehan impor dan pembayaran utang luar negeri. Masuknya devisa ini sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung kegiatan perdagangan internasional. Pemerintah juga sangat bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari sektor minyak dan gas untuk membiayai kebutuhan anggarannya.

Namun, sejak tahun 2010 hingga sekarang Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor batu bara. Banyaknya sumber daya batu bara telah mendorong berkembangnya industri pertambangan batu bara di dalam negeri. Dengan demikian, ekspor batu bara menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap PDB dan pendapatan devisa negara. Batu bara juga memainkan peran krusial bagi sektor energi Indonesia. Batubara menjadi sumber energi utama baik untuk konsumsi domestik dan digemari di pasar ekspor. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan industrialisasi yang meningkat, permintaan energi di Indonesia juga ikut meningkat tiap tahunnya. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor batu bara telah membantu mengimbangi defisit perdagangan dan berkontribusi terhadap surplus perdagangan negara secara keseluruhan. Surplus ini memberikan stabilitas pada perekonomian nasional dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdagangan global.

Namun, ketergantungan Indonesia yang besar pada ekspor batu bara juga menimbulkan tantangan tersendiri. Masalah-masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas pertambangan merupakan isu yang menjadi *concern* kita bersama. Selain itu, volatilitas harga batu bara global juga dapat menimbulkan risiko terhadap perekonomian Indonesia, khususnya menyebabkan fluktuasi pada pendapatan ekspor baik untuk negara maupun perusahaan.

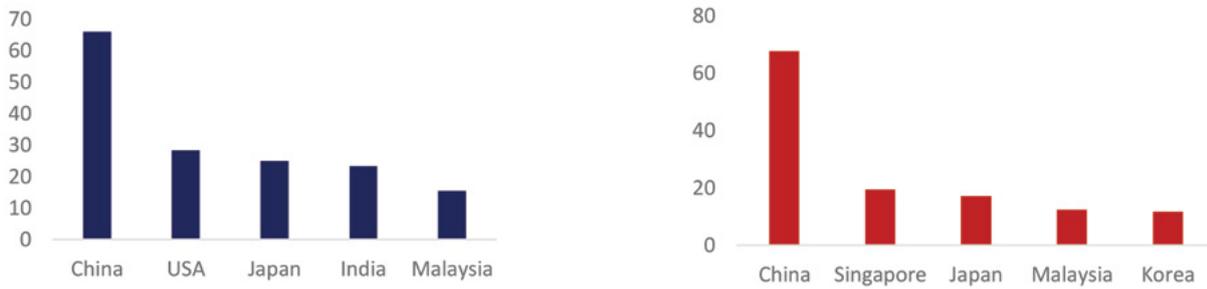
Kondisi perdagangan Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja komoditas impor dan ekspor unggulan Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh mitra dagang Indonesia terutama negara-negara yang memiliki porsi besar terhadap nilai ekspor maupun impor Indonesia. Apabila kondisi ekonomi dari negara mitra dagang Indonesia memiliki tren ekspansif maka aktivitas perdagangan antara negara tersebut dengan Indonesia akan meningkat sehingga memperbaiki kinerja perdagangan Indonesia. Sebaliknya, apabila terjadi kondisi ekonomi kontraktif dari mitra dagang Indonesia, maka dapat menurunkan nilai perdagangan Indonesia.

Tiongkok memegang posisi yang signifikan sebagai mitra dagang Indonesia yaitu menempati posisi terbesar dalam porsi nilai ekspor dan impor Indonesia. Pasca pandemi COVID-19, Ekonomi Tiongkok mengalami kelesuan yang disebabkan oleh krisis properti yang melanda negara tersebut

serta permintaan domestik yang menurun. Alhasil kinerja perdagangan, khususnya impor negara tersebut tertahan. Kondisi ini dapat meluas ke kinerja perdagangan Indonesia karena pengaruh Tiongkok yang besar terhadap portofolio perdagangan Indonesia.

Gambar 2.9 Top 5 Mitra Dagang Indonesia 2023

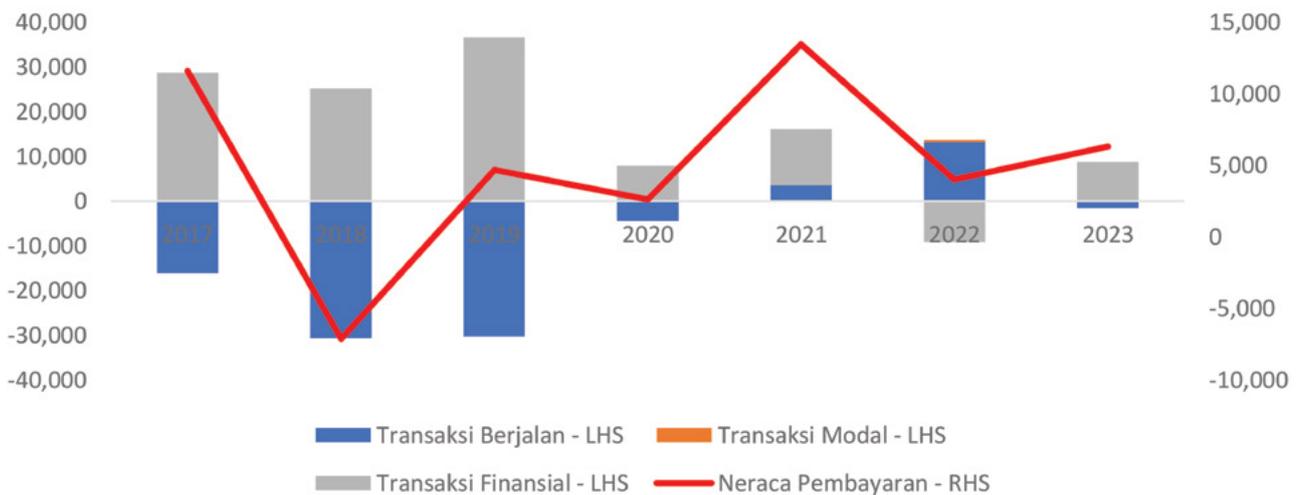
a. Negara Tujuan Ekspor Indonesia (Miliar USD) **b. Negara Asal Impor Indonesia (Miliar USD)**



Sumber: Trade Map

Surplus transaksi berjalan Indonesia yang semakin menipis akibat dari harga komoditas yang menurun dan transaksi finansial Indonesia yang menurun karena tingginya suku bunga acuan negara maju menyebabkan neraca pembayaran Indonesia defisit sejak Q2-2023. Mengakhiri, surplus neraca pembayaran yang terjadi selama tahun 2020 hingga 2022 dan meningkatkan kerentanan nilai tukar Rupiah.

Gambar 2.10 Neraca Pembayaran Indonesia 2016-2023 (Juta USD)

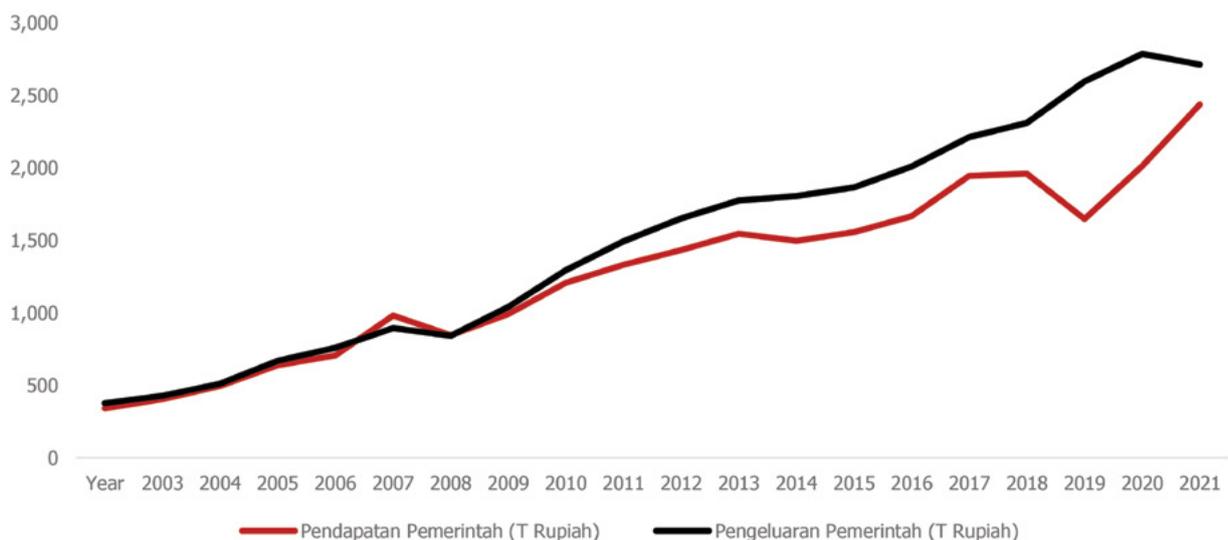


Sumber: Bank Indonesia

2.3. Perkembangan Fiskal

Di tengah tingginya risiko serta volatilitas ekonomi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berperan penting sebagai “*shock absorber*” dalam upaya meredam gejolak perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia. Kinerja APBN tahun 2023 tetap sehat dan terjaga, menopang momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut. Selama 2023, kebijakan fiskal defisit (kondisi dimana pendapatan Pemerintah lebih rendah dibandingkan pengeluarannya) tetap dipertahankan oleh Indonesia.

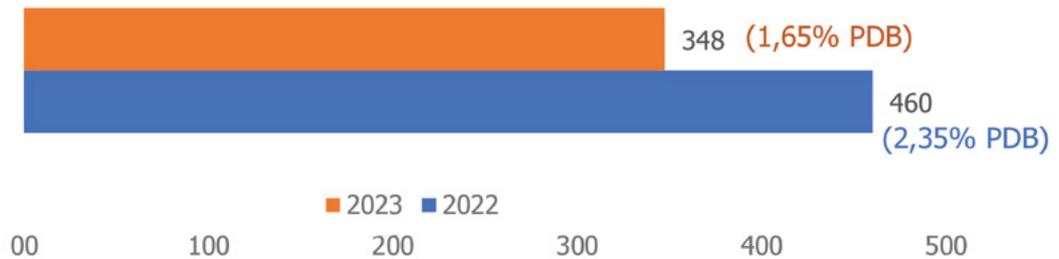
Gambar 2.11 Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemerintah



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan negara mencapai Rp2.500 triliun, melampaui pendapatan sebelum pandemi. Defisit APBN 2023 secara relatif mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp348 triliun atau setara dengan 1,65% dari PDB. Kondisi ini menurun secara dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 460 Triliun atau setara dengan 2,35% dari PDB. Di satu sisi, penurunan defisit fiskal telah mengerem penambahan utang publik baru dan juga menekan laju inflasi, namun di sisi lain penurunan ini juga dapat berimbas pada pengurangan belanja publik pada perekonomian yang dapat memperlambat pertumbuhan.

Gambar 2.12 Defisit Fiskal dan Proporsi Defisit Fiskal terhadap PDB Indonesia



Dari sisi penerimaan negara, terjadi peningkatan penerimaan perpajakan selama 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan efektivitas upaya pemerintah dalam meningkatkan pengumpulan pajak. Namun, terdapat penurunan dalam hibah dan penerimaan bukan pajak (PNBP), yang mencerminkan tantangan dalam optimalisasi pendapatan dari sumber-sumber lain selain pajak. Di sisi pengeluaran, terjadi peningkatan belanja pada Kementerian dan Lembaga (K/L) selama 2023, yang disebabkan oleh peningkatan kebutuhan anggaran untuk program-program tertentu. Sementara itu, terdapat penurunan dalam belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKD) serta belanja non-K/L, yang mungkin mencerminkan upaya pemerintah dalam mengendalikan pengeluaran di sektor-sektor tersebut.

Gambar 2.13 Pendapatan dan Belanja Negara 2022–2023 (Triliun Rupiah)

a. Pendapatan Negara



b. Pengeluaran Negara



Sumber: Kementerian Keuangan

Isu-isu Perbankan



3. ISU-ISU PERBANKAN

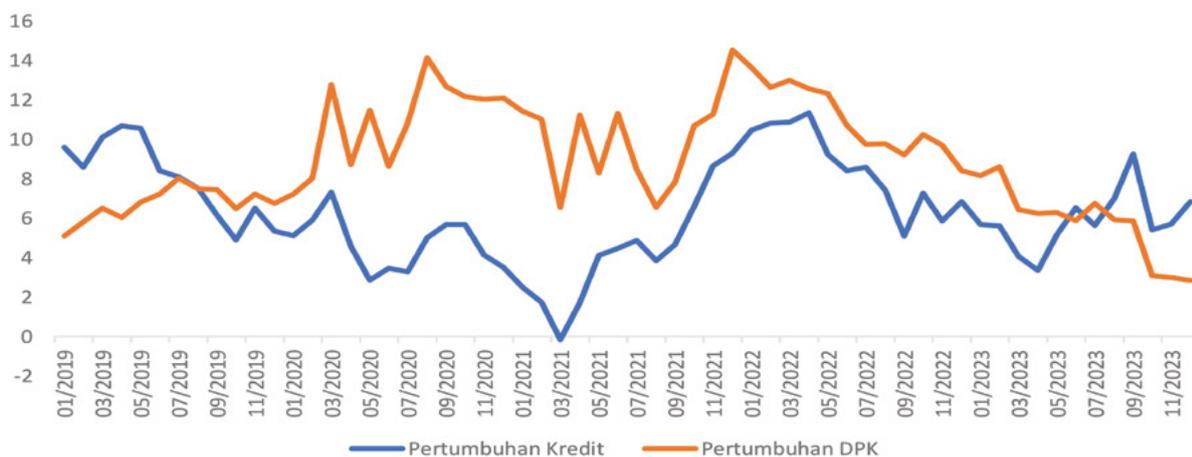
3.1. Kinerja Sektor Perbankan 2023

3.1.1. Penyaluran Kredit Perbankan

Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global dan regional serta volatilitas pasar keuangan internasional, perbankan Indonesia terus mengalami tren positif sejak krisis pandemi COVID-19. Per Oktober 2023, industri perbankan Indonesia tetap solid dan tangguh dengan ditopang tingkat profitabilitas (ROA) dan permodalan (CAR) yang relatif tinggi masing-masing sebesar 2,73 persen dan 27,48 persen.

Pasca pandemi COVID-19, pertumbuhan kredit di Indonesia menunjukkan kinerja yang mengesankan. Pertumbuhan kredit mengalami peningkatan dari -3,77% (yoy) pada tahun 2021 menjadi sekitar 10% (yoy) pada tahun 2023. Keberhasilan koordinasi dan bauran kebijakan antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mampu merangsang perekonomian domestik guna mendukung dunia usaha. Kebijakan suku bunga bank sentral yang kompetitif serta keberhasilan menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sektor keuangan Indonesia.

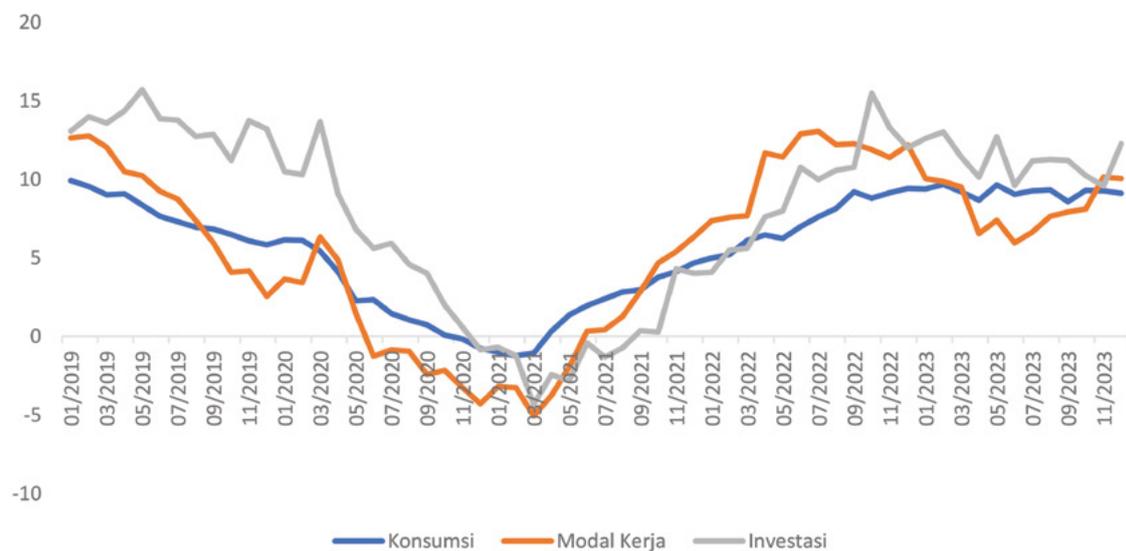
Gambar 3.1 Pertumbuhan DPK dan Kredit (% , yoy)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK

Pertumbuhan likuiditas yang tercermin dari kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020 sampai 2022. Likuiditas yang cukup melimpah ini mendorong terjadinya fungsi intermediasi seiring dengan pulihnya ekonomi pasca pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari kredit konsumsi yang tumbuh kuat di angka 8,9% (yoy) pada tahun 2023. Tumbuh kuatnya pertumbuhan kredit konsumsi menandakan bahwa daya beli masyarakat mulai pulih serta kepercayaan masyarakat terhadap ketahanan perekonomian Indonesia meningkat. Alhasil, masyarakat memiliki kepercayaan untuk meningkatkan konsumsinya melalui pinjaman bank.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis, 2019-2023 (% , yoy)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK

Pulihnya daya beli masyarakat juga memberikan dampak positif bagi sektor riil dimana peningkatan permintaan barang dan jasa dapat memicu dunia usaha untuk memperluas kapasitas produksi dan penjualan. Tidak hanya itu, perubahan perilaku dan preferensi konsumen pasca pandemi COVID-19 juga mendorong investasi dalam teknologi dan inovasi untuk memenuhi perubahan tersebut. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan ini, banyak perusahaan yang menggunakan pinjaman perbankan sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan kredit. Tercatat kredit investasi dan modal kerja tumbuh sebesar 11% (yoy) dan 10,7% (yoy) pada tahun 2023.

Pandemi COVID-19 mengubah lanskap ekonomi, mempercepat tren digitalisasi seperti penggunaan *e-commerce*. Transformasi ini menciptakan peluang bagi bisnis di sektor-sektor seperti teknologi, layanan kesehatan, transportasi (angkutan barang) dan ritel *online*, yang memerlukan akses permodalan untuk memanfaatkan peluang ini. Oleh karena itu, pertumbuhan kredit terutama terjadi pada industri-industri tersebut.

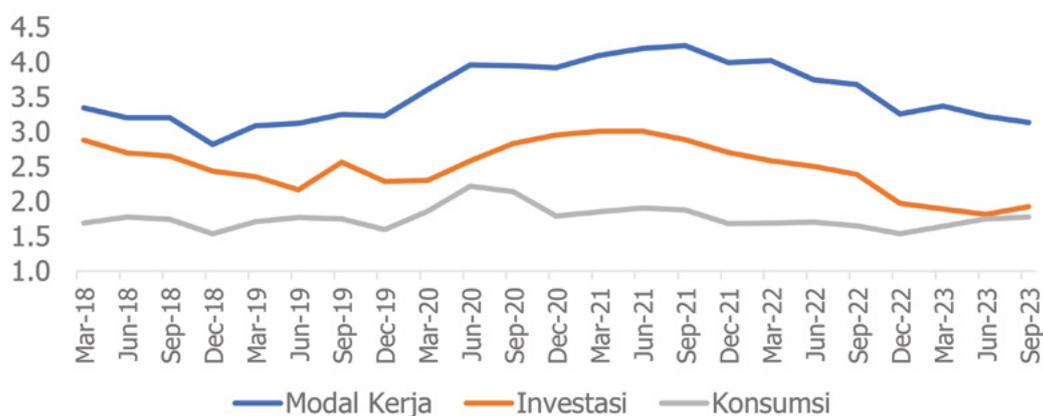
Tidak hanya itu, langkah-langkah regulasi dan program dukungan pemerintah yang bertujuan memfasilitasi akses kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berperan dalam mendorong pertumbuhan kredit. Menyadari pentingnya UMKM dalam mendorong pemulihan ekonomi dan lapangan kerja, pemerintah memberikan jaminan dan subsidi untuk memberikan insentif kepada bank dan lembaga keuangan lainnya agar memberikan pinjaman kepada usaha-usaha tersebut, sehingga mendorong ekspansi kredit.

Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif, permintaan yang meningkat, perubahan struktural dalam perekonomian, dan program dukungan yang ditargetkan berkontribusi terhadap lonjakan pertumbuhan kredit setelah pandemi COVID-19. Namun, meskipun ekspansi kredit dapat mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, para pembuat kebijakan harus memantau kecepatan dan kualitasnya untuk memastikan stabilitas keuangan dan memitigasi risiko seperti leverage yang berlebihan dan penggelembungan aset.

3.1.2. Kondisi NPL Perbankan

Gambar di bawah ini menunjukkan penurunan risiko kredit setelah pandemi yang disebabkan oleh pulihnya tingkat pembayaran perbankan di Indonesia. Pasca program restrukturisasi perbankan, NPL turun dengan stabil yang mencerminkan perbankan dapat mengelola risiko. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang secara kolektif berkontribusi dalam menstabilkan lanskap keuangan dan meningkatkan prospek peminjam dan pemberi pinjaman.

Gambar 3.3 NPL Perbankan berdasarkan Jenis



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK

Pembukaan kembali perekonomian secara bertahap dan peluncuran kampanye vaksinasi telah menyebabkan kebangkitan aktivitas ekonomi dan kepercayaan konsumen. Ketika bisnis kembali beroperasi dan belanja konsumen kembali pulih. Sektor yang paling terpuak oleh pandemi ini, seperti perhotelan, ritel, dan perjalanan mengalami pemulihan secara bertahap. Pemulihan ini telah meningkatkan kesehatan keuangan dunia usaha dan individu, serta mengurangi kerentanan mereka terhadap risiko kredit.

Selain itu, pandemi COVID-19 mendorong sektor perbankan untuk menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati (prudensial). Dari sisi internal, bank mulai memperkuat permodalan seperti penyeleksian debitur dan *Know Your Customer* (KYC). Menghadapi ketidakpastian dan volatilitas, dunia usaha dan rumah tangga menjadi lebih berhati-hati dalam meminjam dan membelanjakan uangnya, dengan fokus pada menjaga likuiditas dan mengurangi tingkat utang. Peningkatan disiplin keuangan ini telah membantu memitigasi risiko kredit dengan meningkatkan kelayakan kredit peminjam secara keseluruhan dan mengurangi kemungkinan gagal bayar.

Selain itu, intervensi peraturan dan langkah-langkah manajemen risiko yang diterapkan oleh lembaga keuangan telah memainkan peran penting dalam mengendalikan risiko kredit. Regulator telah memantau secara ketat kesehatan keuangan bank dan pemberi pinjaman lainnya, melakukan *stress test*, dan menerapkan langkah-langkah kehati-hatian untuk memastikan ketahanan sistem keuangan. Lembaga keuangan juga telah meningkatkan kerangka manajemen risiko mereka dengan menerapkan proses penilaian kredit yang lebih ketat dan mendiversifikasi portofolio pinjaman mereka untuk memitigasi risiko konsentrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, rasio NPL *net* perbankan sebesar 0,77 persen (September 2023: 0,77 persen) dan NPL *gross* sebesar 2,42 persen (September 2023: 2,43 persen). Jumlah kredit restrukturisasi COVID-19 juga melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar Rp301,16 triliun (September 2023: Rp316,98 triliun) atau turun Rp15,83 triliun, dengan jumlah nasabah tercatat sebanyak 1,22 juta nasabah (September 2023: 1,32 juta nasabah) atau berkurang 100 ribu nasabah.

Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi berdampak positif bagi penurunan rasio *Loan at Risk* menjadi 11,81 persen (September 2023: 12,07 persen). Adapun jumlah kredit restrukturisasi COVID-19 yang bersifat *targeted* (segmen, sektor, industri dan daerah tertentu yang memerlukan periode restrukturisasi kredit/pembiayaan tambahan selama satu tahun sampai 31 Maret 2024) adalah 43,39 persen dari total porsi kredit restrukturisasi COVID-19 sebesar Rp130,7 triliun. Di sisi risiko

pasar, kenaikan *yield* di Oktober berdampak pada portofolio perbankan dengan Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan tercatat di level 1,92 persen (September 2023: 1,76 persen), masih jauh di bawah *threshold* 20 persen.

Berkaitan dengan fluktuasi harga pangan akibat anomali cuaca, hasil survei yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa responden memandang inflasi sektor pangan relatif tidak berpengaruh signifikan pada kinerja pertumbuhan kredit maupun kinerja debitur. Namun demikian, bank tetap perlu melakukan langkah antisipatif antara lain dengan melakukan edukasi kepada pelaku usaha sektor pertanian agar mampu menghindari risiko inflasi pangan, dan melakukan pemantauan harga produksi debitur beserta analisis sensitivitas/*stress test* terhadap penambahan modal kerja yang dilakukan secara berkala.

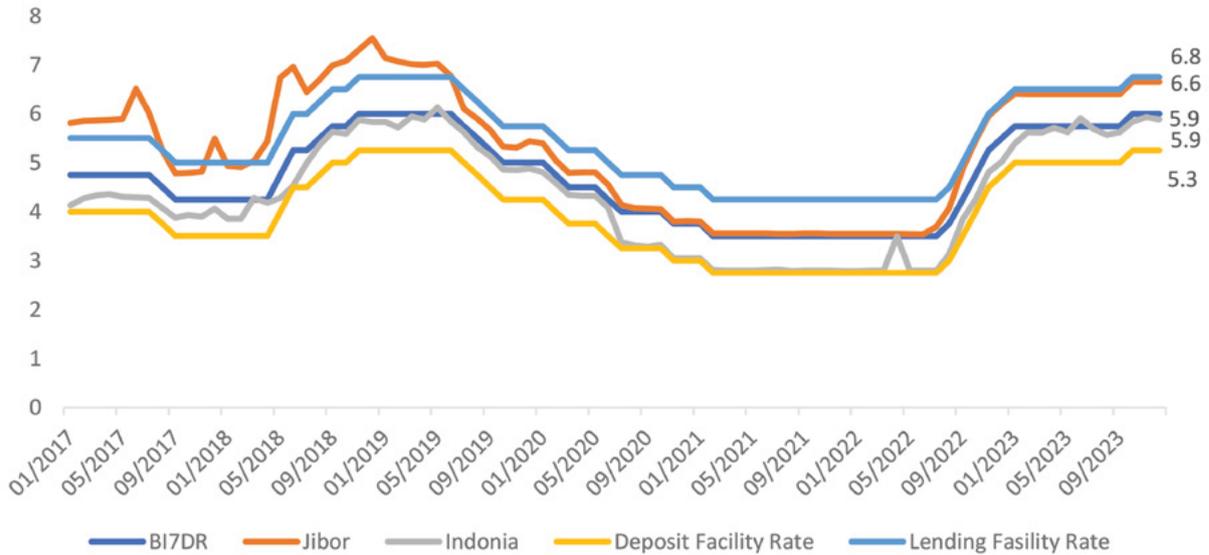
3.1.3. Tren Suku Bunga

Suku bunga bank sentral atau suku bunga acuan mempunyai dampak yang signifikan terhadap suku bunga yang ditawarkan bank kepada debitur dan dibayarkan bank kepada penyimpan (deposan). Pengaruh ini terutama disebabkan oleh peran bank sentral dalam membentuk kebijakan moneter untuk mempengaruhi pasokan (*supply*) uang dan kredit dalam perekonomian.

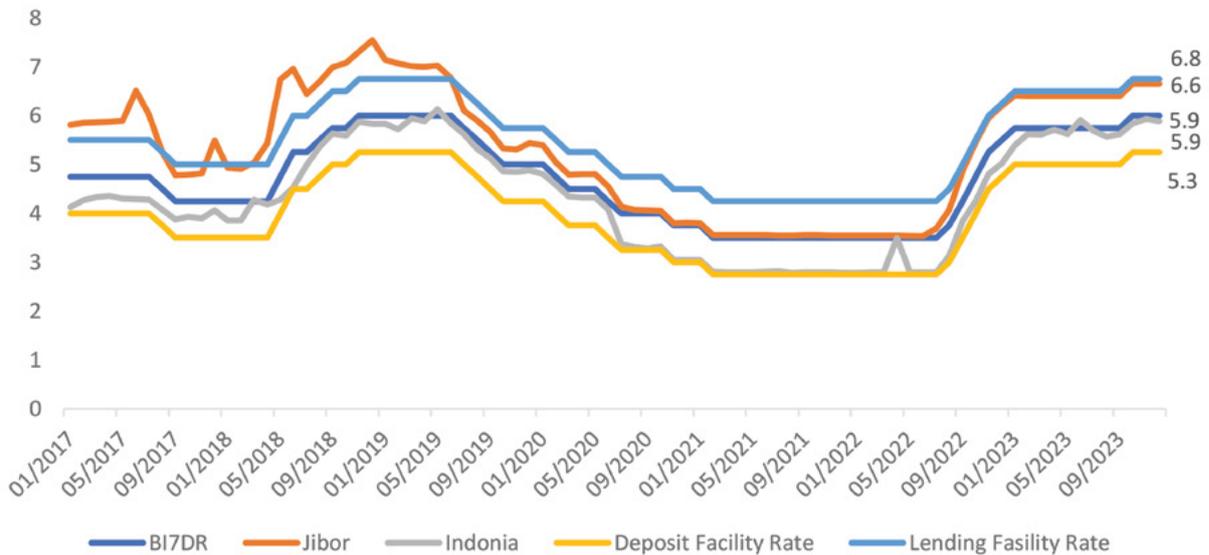
Dalam konteks Indonesia, suku bunga BI berfungsi sebagai acuan bagi bank ketika menentukan suku bunga pinjaman dan simpanannya. Ketika BI menaikkan suku bunga acuannya, maka biaya meminjam dari bank sentral akan menjadi lebih mahal bagi bank-bank umum. Akibatnya, bank juga akan menaikkan suku bunga pinjaman untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Kenaikan suku bunga pinjaman ini membuat pinjaman menjadi lebih mahal bagi dunia usaha dan masyarakat sehingga menyebabkan penurunan permintaan kredit, berujung pada melambatnya kegiatan perekonomian. *Vice versa*.

Gambar 3.4 Transmisi Suku Bunga BI terhadap Suku Bunga Lainnya, 2017-2023

a. Suku Bunga BI & Interbank (%)



b. Suku Bunga BI , Kredit, & Deposito (%)



Sumber: Bank Indonesia

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa suku bunga perbankan (suku bunga kredit, deposito, dan *interbank rate*) dipengaruhi oleh suku bunga bank sentral. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga BI dapat ditransmisikan ke level lebih mikro yaitu perbankan. Namun, bank biasanya tidak secara langsung mengubah suku bunga pinjamannya seiring dengan perubahan suku bunga bank sentral

karena beberapa faktor, termasuk struktur sistem keuangan, lanskap persaingan, dan mekanisme transmisi moneter. Kondisi ini terlihat dari Gambar 3.4b yang menunjukkan bahwa suku bunga pinjaman tidak selalu sejalan dengan tren suku bunga kebijakan.

Bank beroperasi dalam ekosistem keuangan yang kompleks dimana banyak faktor mempengaruhi suku bunga pinjamannya. Meskipun suku bunga bank sentral berfungsi sebagai titik acuan yang penting, bank juga mempertimbangkan berbagai faktor lain ketika menentukan suku bunga pinjamannya, seperti biaya dana, biaya operasional, risiko kredit, dan margin keuntungan. Perubahan suku bunga bank sentral mungkin tidak berdampak langsung terhadap faktor-faktor tersebut sehingga menyebabkan terciptanya perbedaan antara suku bunga bank sentral dan suku bunga pinjaman bank.

Selain itu, dinamika persaingan industri perbankan berperan penting dalam membentuk suku bunga kredit. Bank beroperasi di pasar yang kompetitif di mana mereka bersaing untuk mendapatkan konsumen dan strategi penetapan harga yang sangat dipengaruhi oleh struktur dan kekuatan pasar. Meskipun perubahan suku bunga bank sentral dapat mempengaruhi biaya pendanaan bank, masing-masing bank dapat memilih untuk menyesuaikan suku bunga pinjamannya secara berbeda berdasarkan tujuan strategis, selera risiko, dan segmentasi pasarnya. Persaingan antar bank ini dapat mengakibatkan variasi suku bunga pinjaman antar entitas, bahkan ketika suku bunga bank sentral berubah.

Mekanisme transmisi moneter, yang mengacu pada proses perubahan suku bunga bank sentral mempengaruhi perekonomian secara luas, mungkin tidak selalu berjalan lancar dan instan. Walaupun perubahan suku bunga bank sentral dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku peminjaman dan pembelanjaan di seluruh perekonomian, transmisi perubahan suku bunga ini ke suku bunga pinjaman dapat mengalami jeda. Misalnya, bank mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan suku bunga pinjamannya sebagai respons terhadap perubahan suku bunga bank sentral dan peminjam mungkin tidak segera bereaksi terhadap perubahan biaya pinjaman.

3.1.4. Likuiditas Perbankan

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencerminkan likuiditas perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan sepanjang tahun 2023. Pada awal tahun 2023, Januari, DPK tumbuh sebesar 8,5 persen, kemudian menurun ke angka 5,3 pada Juni 2023. Pertumbuhan DPK terus melambat hingga

3,8 persen di akhir 2023. Penurunan simpanan masyarakat sering kali mencerminkan terjadinya perubahan faktor ekonomi dan keuangan pribadi seperti perubahan kebiasaan belanja dan tingkat pendapatan.

Tabel 3.1 Rata-Rata Saldo Tabungan Masyarakat Indonesia, 2018-2023

	Rata2 Nasional	Kecil	Menengah-Kecil		Menengah-Besar		Besar	
		<Rp100jt	Rp100-200jt	Rp200-500jt	Rp500jt-1M	Rp1-2M	Rp2-5M	>Rp5M
2018	20.7	3.1	140.4	321.3	727.4	1,431	3,131	27,626
2019	20.1	3.0	140.3	320.2	723.1	1,423	3,125	27,293
2020	19.2	2.8	140.1	320.0	722.5	1,423	3,123	29,095
2021	19.5	2.6	140.0	318.3	719.1	1,413	3,136	31,660
2022	16.1	2.0	140.4	319.5	722.5	1,419	3,172	33,491
Jan-23	15.8	2.0	140.5	319.9	722.2	1,417	3,167	32,970
Feb-23	15.2	1.9	140.5	320.0	722.0	1,418	3,167	33,128
Mar-23	15.7	2.0	140.6	319.5	722.2	1,418	3,169	33,181
Apr-23	15.8	2.0	140.5	319.5	722.0	1,416	3,165	33,148
May-23	15.6	2.0	140.5	319.8	722.5	1,419	3,172	32,827
Jun-23	15.5	2.0	140.5	319.8	721.7	1,417	3,169	32,806
Jul-23	15.4	1.9	140.6	320.1	721.4	1,418	3,171	32,286
Aug-23	15.3	1.9	140.7	320.3	722.2	1,421	3,178	32,063
Sep-23	15.2	1.9	140.5	320.0	722.0	1,418	3,167	33,128
Okt-23	15.1	1.9	140.7	320.2	722.6	1,422	3,262	32,602
Nov-23	14.9	1.9	140.6	320.0	722.3	1,421	2,323	32,329

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, diolah oleh Tim Ekonom PERBANAS

Pada kasus pelambatan DPK kali ini, terdapat indikasi adanya fenomena “makan tabungan” atau mantab pada masyarakat Indonesia. Tabel 3.1 menunjukkan rata-rata saldo per rekening pada tingkat nasional mengalami penurunan sepanjang tahun 2023 dengan rata-rata saldo per rekening di bawah 100 juta cenderung stagnan di angka 1,9 juta. Hal ini mengindikasikan adanya fenomena mantab pada masyarakat kelas menengah-bawah sehingga menyulitkan mereka untuk menabung.

Fenomena mantab merupakan suatu keadaan dimana masyarakat berbelanja melebihi dari pendapatan yang diterimanya sehingga terpaksa untuk menggunakan tabungannya. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa terdapat indikasi fenomena mantab pada kelas menengah-bawah sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 namun semakin signifikan ketika pandemi COVID-19 berakhir. Ini terlihat dari rata-rata saldo per rekening yang menurun dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rata-rata saldo per rekening sebesar 3 juta lalu pada tahun selanjutnya menurun ke angka 2,8 juta kemudian terus menurun di tahun berikutnya hingga berkurang ke angka 1,9 juta per rekening pada November 2023.

Penurunan jumlah tabungan masyarakat menengah-bawah selama pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang berada dalam ekspektasi. Kontraksi pada berbagai sektor ekonomi yang berimplikasi pada pemutusan hubungan kerja (PHK) masal selama pandemi menyebabkan masyarakat pada golongan ini terpaksa untuk menggunakan dana tabungannya untuk bertahan hidup. Terlebih, ketidakpastian kondisi ekonomi juga menyulitkan masyarakat yang ter PHK untuk mendapatkan kembali pekerjaan.

Pasca pandemi COVID-19, tabungan kelas menengah-bawah justru semakin tergerus. Peningkatan lapangan kerja seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi memulihkan daya beli dan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depannya. Hanya saja, rantai pasok global yang terdisrupsi menyebabkan harga-harga khususnya pangan dan energi mengalami kenaikan. Alhasil, masyarakat menengah-bawah perlu mengeluarkan uang lebih untuk mengonsumsi barang dan jasa. Hal ini menyebabkan sulitnya mereka untuk menabung dan tergerusnya DPK nasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi juga berpengaruh terhadap pelambatan pertumbuhan DPK. Kemudahan akses investasi yang ditawarkan oleh penggunaan teknologi digital serta imbal hasil yang lebih tinggi menggeser preferensi masyarakat dari menyimpan uang di bank ke instrumen investasi seperti reksadana, obligasi, dan saham. Terlebih, tingkat suku bunga BI tinggi namun suku bunga deposito yang berada di bawah suku bunga BI membuat masyarakat beralih ke instrumen keuangan lainnya.

3.1.5. Tren Kredit Sektoral Menjelang Pemilu

Tabel 3.2 menunjukkan sektor konstruksi dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi mengalami peningkatan kredit yang relatif lebih tinggi dari sektor lainnya pada saat periode pemilu. Pada pemilu 2014, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan kredit sebesar 37 persen, sedangkan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi tumbuh di angka 12 persen. Pertumbuhan kredit yang cukup signifikan ini juga terjadi pada satu tahun menjelang pemilu dimana kedua sektor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 26 persen. Pola ini juga terjadi pada pemilu 2019 dimana sektor konstruksi tumbuh 15 persen dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi tumbuh sebesar 14 persen. Sedangkan pada satu tahun sebelum pemilu 2019, sektor konstruksi tumbuh sebesar 22 persen dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi tumbuh sebesar 19 persen.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor

Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	30%	49%	0%	20%	11%	12%	12%	4%	4%	8%	10%	3%
Perikanan	11%	40%	0%	15%	7%	19%	8%	16%	14%	17%	6%	2%
Pertambangan dan Pertambangan	29%	37%	0%	23%	36%	-16%	21%	-3%	-7%	23%	54%	7%
Industri Pengolahan	33%	43%	0%	11%	6%	-2%	9%	4%	-4%	6%	12%	-1%
Listrik, gas dan air	29%	35%	2%	67%	27%	-15%	16%	16%	-15%	-5%	2%	-3%
Konstruksi	27%	26%	37%	12%	14%	23%	22%	15%	4%	1%	4%	2%
Perdagangan Besar dan Eceran	22%	11%	12%	11%	6%	5%	10%	3%	-6%	3%	7%	4%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	46%	66%	8%	14%	1%	67%	2%	10%	6%	4%	2%	1%
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	25%	26%	12%	3%	-3%	6%	19%	14%	8%	15%	2%	10%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, diolah oleh Tim Ekonom PERBANAS

Kenaikan permintaan kredit menjelang pemilu pada sektor konstruksi erat kaitannya dengan strategi kampanye untuk meraih kemenangan. Anggota legislatif ataupun eksekutif yang kembali mencalonkan untuk periode berikutnya menggunakan proyek-proyek pembangunan fasilitas publik seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung, dan perbaikan transportasi umum untuk meningkatkan suara rakyat. Alhasil, kredit konstruksi cenderung meningkat di tahun tersebut.

Aktivitas pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi cenderung terdorong selama masa kampanye. Aktivitas kampanye yang dilakukan oleh partai politik, calon legislatif, ataupun calon eksekutif dilakukan dari perkotaan hingga perdesaan di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, terjadi peningkatan aktivitas perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya yang mendorong sektor transportasi. Tidak hanya itu, pengadaan barang seperti baliho, spanduk, dan beras cenderung meningkat saat masa kampanye sehingga meningkatkan permintaan logistik.

Menakar Kebijakan Perumahan Pasca 2024 -Oleh: Housing Finance Center Bank BTN-

Program dan Kebijakan Perumahan 2014-2024

Pemerintah saat ini telah memiliki banyak program penyediaan maupun pembiayaan rumah. Dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni yang *affordable*, pemerintah menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di antara program penyediaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah antara lain: (1) membangun rumah susun sebagai bagian dari Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015, (2) membangun rumah khusus yang sampai dengan saat ini fokus pada pembangunan rumah di kawasan perbatasan, (3) stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk mendorong penyediaan fasilitas kelengkapan di kawasan perumahan seperti jaringan listrik maupun air bersih, (4) juga program Bantuan Stimulus Pembangunan Rumah Swadaya (BSPRS) yang menyediakan alternatif penyediaan rumah dengan cara membangun unit rumah langsung atau dengan renovasi rumah sehingga lebih layak huni. Dengan berbagai program ini, sejak 2015-2023 program penyediaan perumahan telah terealisasi sebanyak 1,9 juta unit rumah.

Program penyediaan yang ada perlu disinergikan dengan program pembiayaan agar unit yang telah dibangun dapat dimiliki oleh masyarakat yang target pasar. Pemerintah beserta *stakeholders* lainnya telah memiliki berbagai program pembiayaan antara lain Program Subsidi Selisih Bunga yang memberikan bunga tetap kepada masyarakat untuk bisa memiliki rumah subsidi, program BP2BT yang mendorong calon penerima bantuan untuk menabung terlebih dahulu kemudian diberikan subsidi uang muka, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di mana perbankan yang memberikan pembiayaan terhadap rumah subsidi diberikan fasilitas likuiditas oleh pemerintah, KPR Tapera dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Namun berbagai program penyediaan dan pembiayaan ini perlu dievaluasi pelaksanaannya mengingat masih terdapat 12,75 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah yang mayoritas berasal dari segmen MBR Informal dengan proporsi sebesar 60%. Jika dilihat berdasarkan provinsi, maka pusat sebaran *backlog*, yaitu kondisi dimana belum terpenuhinya jumlah rumah yang dibutuhkan pada suatu kawasan atau wilayah tertentu, mayoritas berada di Jawa.

Terdapat beberapa hambatan yang menjadi isu dalam pembiayaan yang menyebabkan belum teratasinya masalah *backlog*. Pertama terdapat masalah di mana penyediaan rumah untuk MBR dan MBR informal berada di luar kota, sementara berdasarkan data BPS (2021), 67,1% masyarakat tinggal di perkotaan. Kondisi ini menghambat penyerapan dari unit-unit rumah yang telah disediakan karena tidak menarik bagi target pasar yang beraktivitas di tengah kota.

Isu kedua adalah sulitnya MBR informal untuk memperoleh pembiayaan untuk memiliki rumah. Berdasarkan data Bank BTN (2022), hanya 9% penyaluran KPR Subsidi yang manfaatnya dirasakan oleh MBR informal. Kesulitan ini bisa jadi disebabkan oleh faktor penghasilan sehingga dinilai memiliki risiko tinggi untuk dibiayai oleh perbankan.

Isu ketiga terkait dengan kapasitas penyediaan rumah per tahun, baik dari pemerintah maupun swasta yang hanya mampu menyediakan maksimal 1 juta unit per tahun. Sedangkan kebutuhan rumah per tahunnya diperkirakan sebanyak 1,9 juta unit per tahun (Susenas dan Kementerian PUPR 2016-2020). Berbagai kondisi ini menjadi bahan evaluasi agar program penyediaan maupun pembiayaan perumahan, khususnya bagi MBR informal, lebih tepat sasaran dan mengatasi permasalahan *backlog* di Indonesia.

Rencana Program dan Kebijakan Perumahan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Program perumahan pasangan Anies – Muhaimin, terdapat agenda tentang perumahan berupa kemudahan akses hunian dan menargetkan penurunan angka *backlog* turun menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Di antara program untuk mencapai target tersebut adalah menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan harga terjangkau bagi semua kalangan termasuk anak muda dan pekerja informal, menyediakan hunian layak dengan sistem sewa terjangkau. Ditargetkan akan ada penyediaan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang tersambung dengan transportasi umum.

Prabowo – Gibran dalam program kerja yang terkait dengan perumahan menargetkan akan membangun dan merenovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun sehingga akan dapat dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua. Sementara untuk di daerah perkotaan, akan dibangun 500 ribu rumah tapak (*landed house*) dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun sederhana milik) dan rusunawa (rumah susun sederhana sewa). Dengan demikian target pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional selama satu periode pemerintahan.

Ganjar – Mahfud memiliki program perumahan bernama Rumah Kita-10 juta hunian dalam bentuk pembangunan hunian baru atau renovasi disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum untuk MBR, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah. Untuk masyarakat desa juga dibuat program Kampung Sehat yang memperbaiki kampung kumuh di desa dan kota dengan hunian layak, sanitasi sehat, air minum dan air bersih, fasilitas umum dan sosial memadai, dan ruang terbuka hijau yang mencukupi.

Program Perumahan Capres-Cawapres 2024-2029

Berdasarkan evaluasi program perumahan yang telah berjalan dan rencana program kerja terkait perumahan dari para calon presiden dan wakil presiden, setidaknya ada beberapa masukan yang dapat diberikan untuk menyempurnakan program perumahan agar lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap pengurangan angka *backlog* seperti yang menjadi tujuan umum program perumahan dari seluruh calon. Untuk perbaikan program perumahan para calon presiden dan wakil presiden, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan bidang perumahan jika nanti terpilih.

Seluruh program perumahan dari semua calon masih berorientasi pada penyediaan rumah namun kurang memikirkan teknis pembiayaannya. Karena faktor pembiayaan ini akan menentukan bagaimana masyarakat dapat memperoleh rumah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan bagaimana lembaga pembiayaan dapat membiayai masyarakat untuk bisa memiliki hunian yang layak.

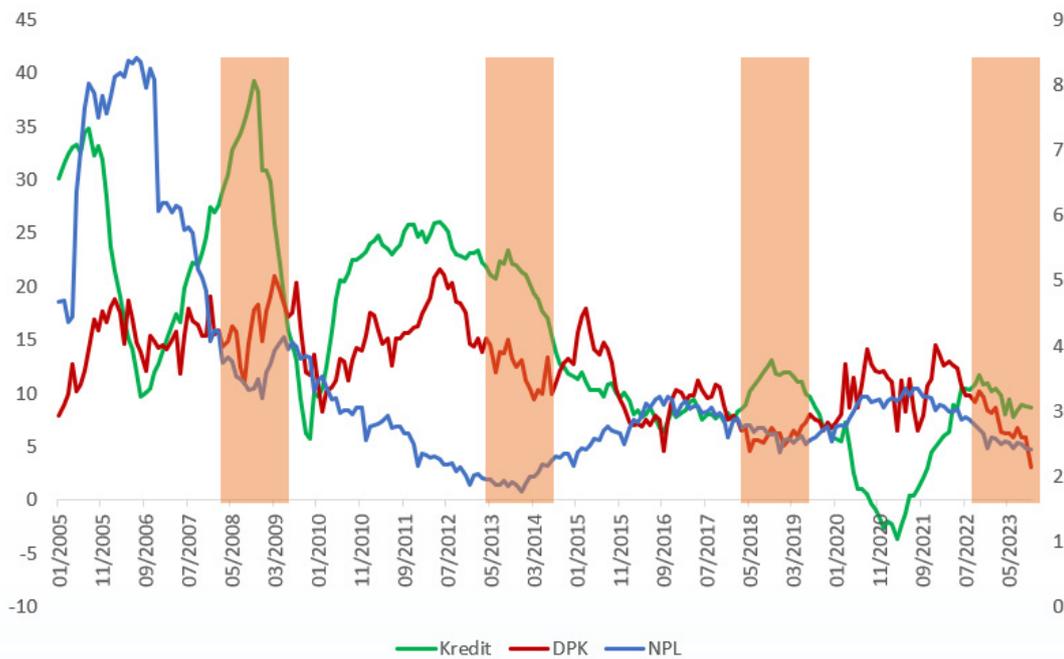
MBR informal adalah segmen masyarakat yang selama ini paling banyak belum memiliki rumah karena faktor ekonomi dan sulitnya memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Bentuk bantuan yang ada selama ini seperti FLPP, BSPS, Subsidi Uang Muka, dan Subsidi Selisih Bunga belum mampu mengakomodasi kebutuhan MBR Informal karena hanya mampu dirasakan manfaatnya oleh 9% populasi MBR informal. Kelompok MBR informal tidak bisa dibiayai oleh perbankan karena pola penghasilan yang tidak menentu sehingga meningkatkan risiko gagal bayar bagi perbankan. Dalam penyelesaian *backlog* perumahan dibutuhkan program bantuan perumahan yang tidak hanya *affordable*, namun juga *equitable* serta mendukung sustainability bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subsidi perumahan.

Dibutuhkan inovasi skema pembiayaan bagi masyarakat agar bisa memperoleh rumah layak huni. Inovasi pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah cara mengukur kemampuan ekonomi MBR informal. Jika pengukuran kemampuan ekonomi calon nasabah KPR masih berdasarkan penghasilan per bulan yang sangat berorientasi pada kelompok masyarakat berpenghasilan tetap seperti yang dilakukan saat ini, maka dengan pola penghasilan yang bersifat harian atau mingguan dan tidak menentu, tentu MBR informal tidak akan memenuhi kriteria untuk dibiayai. Oleh karena itu dibutuhkan metode pengukuran kemampuan ekonomi yang baru bagi MBR informal yaitu dengan mengukur pola pengeluaran MBR informal. Dengan mengukur pola pengeluaran, maka lembaga jasa keuangan akan mampu memperoleh informasi riil seberapa banyak uang yang dikeluarkan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan pengukuran ini, maka kapasitas masyarakat dalam membayar bisa tercermin secara lebih riil.

Dalam skema pembiayaan juga perlu dipikirkan agar besaran cicilan dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Secara umum, dalam skema pembayaran jika ingin cicilan lebih kecil, maka periode pembayaran atau tenor perlu diperpanjang. Tentu hal ini diterapkan dengan tetap memperhatikan usia produktif dari masyarakat itu sendiri. Bagi masyarakat yang bekerja di sektor ekonomi tertentu di mana berpeluang untuk mengalami kenaikan gaji yang berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan, tentu cicilan dengan tenor panjang ini dapat menjadi alternatif yang menguntungkan mengingat dengan seiring berjalannya waktu dan ada kondisi ekonomi yang membaik, maka cicilan untuk rumah menjadi tidak memberatkan. Oleh karena itu, ide memperpanjang tenor cicilan untuk kepemilikan rumah bisa menjadi alternatif agar cicilan lebih terjangkau oleh masyarakat untuk memiliki rumah.

Untuk mendukung pembiayaan bagi MBR, juga dibutuhkan sumber pendanaan jangka panjang dan berkelanjutan agar terus dapat mendukung pembiayaan. Sumber pendanaan ini harus bersumber dari dana berbiaya murah dan mampu dipertahankan untuk jangka panjang. Kebutuhan dana jangka panjang ini mengingat pembiayaan perumahan adalah program pembiayaan jangka panjang. Di antara alternatif sumber pendanaan jangka panjang adalah dengan memanfaatkan kombinasi antara APBN, dana pensiun, maupun obligasi berbiaya rendah. Penyediaan dana murah jangka panjang ini akan membantu regulator, perbankan dan *stakeholders* lain untuk kepastian dana program.

Gambar 3.5 Pertumbuhan Kredit, DPK, & NPL, 2005-2023



Sumber: OJK dan CEIC, diolah oleh Tim Ekonom PERBANAS

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan kredit dan DPK cenderung melemah pada saat tahun pemilu. Pelemahan kredit dari perbankan dapat dilihat dari dua sisi yaitu *supply* dan *demand*. Sepanjang pemilu ada kemungkinan ketidakpastian politik yang mempengaruhi bisnis masa depan. Dari sisi *demand*, Ketika dunia usaha mengalami ketidakpastian mengenai kondisi perekonomian di masa depan akibat pemilu akan berefek pada tertundanya keputusan investasi dan rencana ekspansi, sehingga menyebabkan berkurangnya permintaan pinjaman. Dari sisi *supply*, ada kecenderungan bank akan memilih untuk mengambil sikap *risk aversion* (penghindaran risiko) selama periode ketidakpastian ekonomi dalam pemilu, dapat menyebabkan pengetatan standar pemberian pinjaman dan penurunan tingkat kredit.

Namun, pelemahan ini tentu bukan hanya disebabkan oleh Pemilu semata, tapi juga berbagai faktor lainnya bergantung konteks tahun tersebut. Misal, pada tahun 2008 dan 2009 lantaran periode krisis keuangan global. Pada tahun 2013 dan 2014 kredit mengalami penurunan dikarenakan akhir dari *boom* komoditas yang menyebabkan kelesuan ekonomi domestik mengingat mayoritas ekspor Indonesia merupakan bahan mentah.

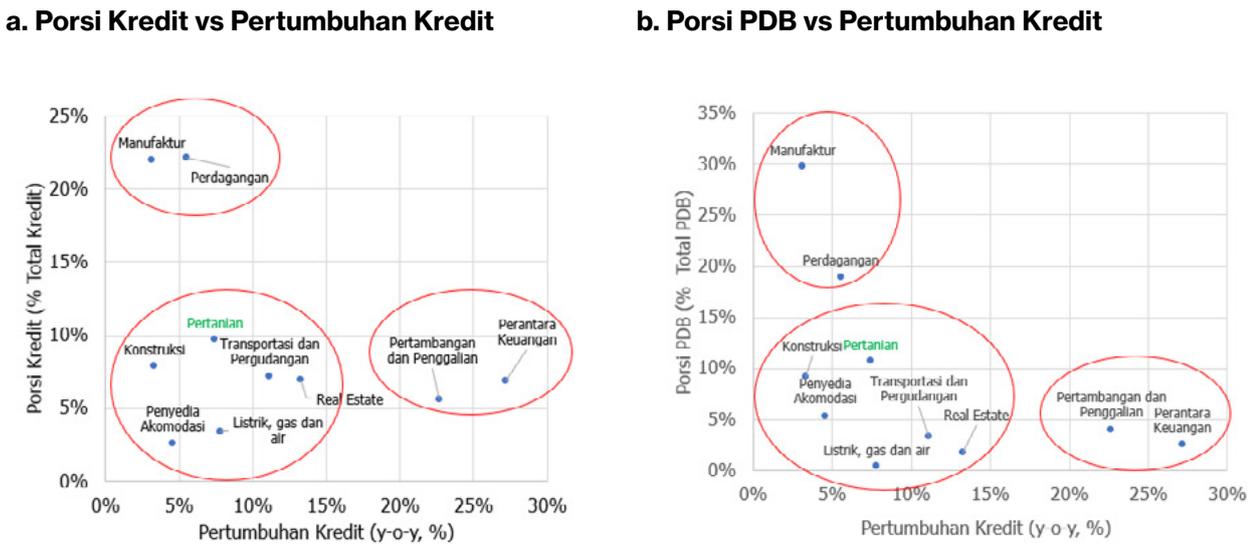
Gambar 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Kredit, DPK, & NPL Selama Pemilu



Sumber: Perhitungan Tim Ekonom PERBANAS, 2024

Berdasarkan analisis rata-rata yang dilakukan PERBANAS, dapat dilihat bahwa pertumbuhan kredit dari tahun ke tahun cenderung melemah pada saat pemilu dan setelah pemilu. Begitu juga dengan pertumbuhan DPK yang ikut melambat pada saat Pemilu. Hal ini memperkuat argumen terjadinya “wait and see” oleh para aktor ekonomi ketika masa-masa Pemilu, namun ekonomi kembali bergairah setelah hasil Pemilu telah dapat disimpulkan. Dikarenakan adanya perlambatan pertumbuhan kredit sepanjang pemilu, maka NPL relatif rendah. NPL mulai mengalami kenaikan pada saat setelah pemilu karena mulai adanya ekspansi bisnis dan kredit.

Gambar 3.7 Pola Porsi dan Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor



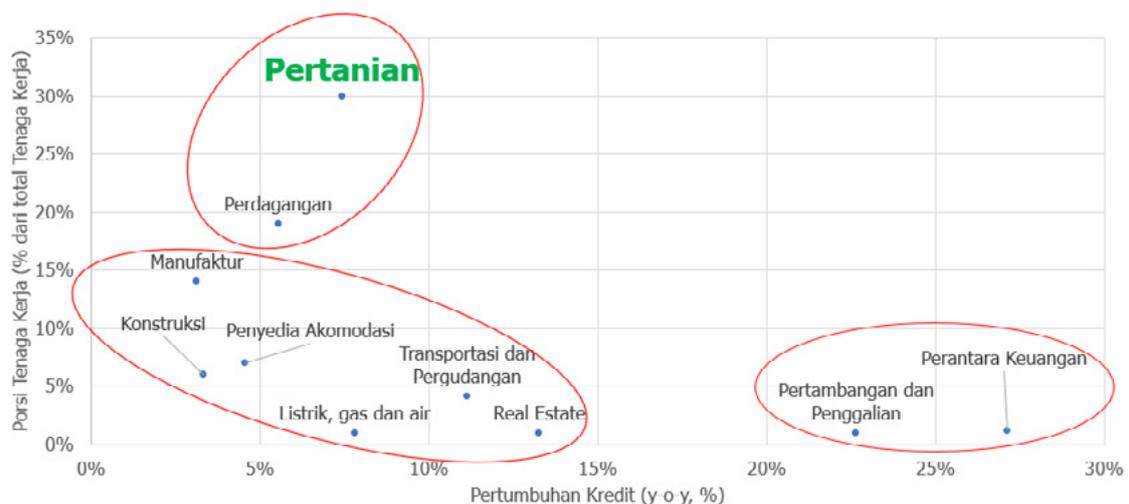
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, diolah oleh Tim Ekonom PERBANAS

Gambar 3.7a menunjukkan pola share kredit dengan pertumbuhan kredit per sektor. Berdasarkan gambar tersebut, kredit perbankan paling besar di salurkan ke sektor manufaktur dan sektor perdagangan. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia sehingga kecukupan modal pada kedua sektor tersebut diperlukan untuk menjaga perekonomian Indonesia.

Sektor dengan pertumbuhan kredit tinggi namun memiliki share kredit yang rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor perantara keuangan. Kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan kredit yang melebihi 20 persen namun, porsinya terhadap total kredit kurang dari 10 persen. Tingginya pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan dan penggalian salah satunya disebabkan oleh *windfall* pada sejumlah komoditas pertambangan Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan permintaan kredit digunakan untuk mendorong produktivitas perusahaan agar dapat meraih keuntungan yang optimum selama melejitnya harga komoditas pertambangan.

Pertumbuhan kredit sektor perantara keuangan berkisar di angka 7–8 persen pada periode sebelum pandemi COVID-19. Sektor ini turut mengalami kontraksi kredit yang signifikan selama pandemi COVID-19. Pasca pandemi COVID-19, pertumbuhan kredit sektor perantara keuangan melonjak tajam ke angka 20 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya pertumbuhan kredit sektor ini disebabkan oleh pemulihan aktivitas ekonomi dari pandemi COVID-19 yang turut mendorong transaksi intermediasi keuangan. Terlebih, beragam program relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun bank sentral turut berkontribusi terhadap tendensi masyarakat untuk meminjam pada perusahaan perantara keuangan.

Gambar 3.8 Porsi Tenaga Kerja vs Pertumbuhan Kredit



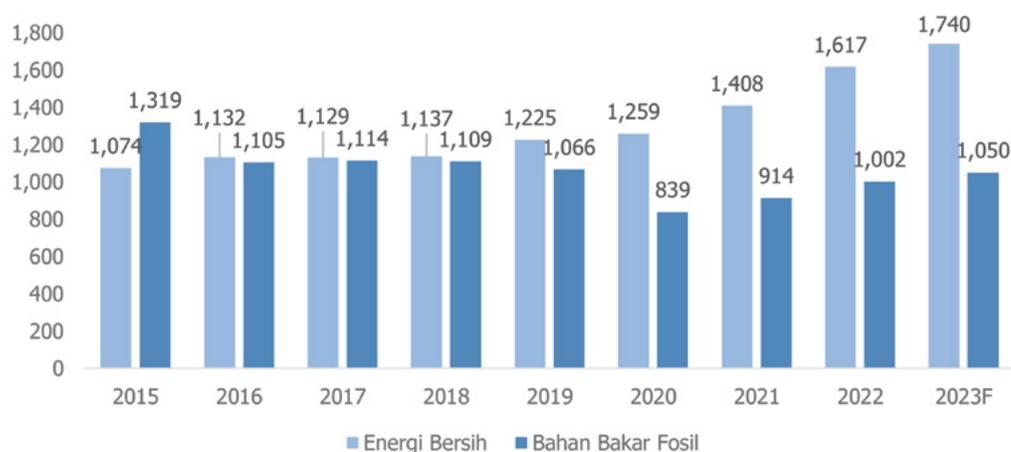
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, diolah oleh Tim Ekonom PERBANAS

Gambar 3.8 menunjukkan pola pertumbuhan kredit per sektor serta kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja yaitu berkontribusi sebesar 30 persen terhadap total tenaga kerja. Hanya saja, pertumbuhan kredit pada sektor tersebut cenderung rendah. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor perantara keuangan memiliki pertumbuhan kredit yang tinggi namun kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia sektor pertanian memiliki karakteristik *labor intensive* sedangkan sektor pertambangan dan penggalian serta sektor perantara keuangan merupakan *capital intensive*. Biaya operasional sektor pertambangan maupun perantara keuangan memiliki dependensi yang tinggi terhadap kepemilikan modal, sedangkan pertanian di Indonesia cenderung sederhana tanpa memerlukan peralatan canggih sehingga kebutuhan untuk kepemilikan modal tidak sebesar sektor pertambangan.

3.2. Energi Baru Terbarukan (EBT)

Dalam beberapa dekade terakhir, topik pemanasan global dan transformasi energi selalu menjadi topik hangat bagi pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat umum. Efek pemanasan global yang semakin terasa pada seluruh belahan dunia menjadikan isu ini krusial untuk dimitigasi. Terlebih lagi, manusia memegang peranan yang signifikan terhadap tingginya suhu dunia saat ini. Perkembangan industri yang semakin pesat dalam beberapa dekade terakhir memiliki korelasi terhadap penambahan suhu bumi. IPCC mengemukakan bahwa terjadi peningkatan kontribusi manusia terhadap total kenaikan suhu permukaan bumi dimana kisaran total kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh manusia pada periode tahun 1850–1900 adalah sekitar 0,8°C, sedangkan pada periode tahun 2010–2019 mencapai 1,3°C.

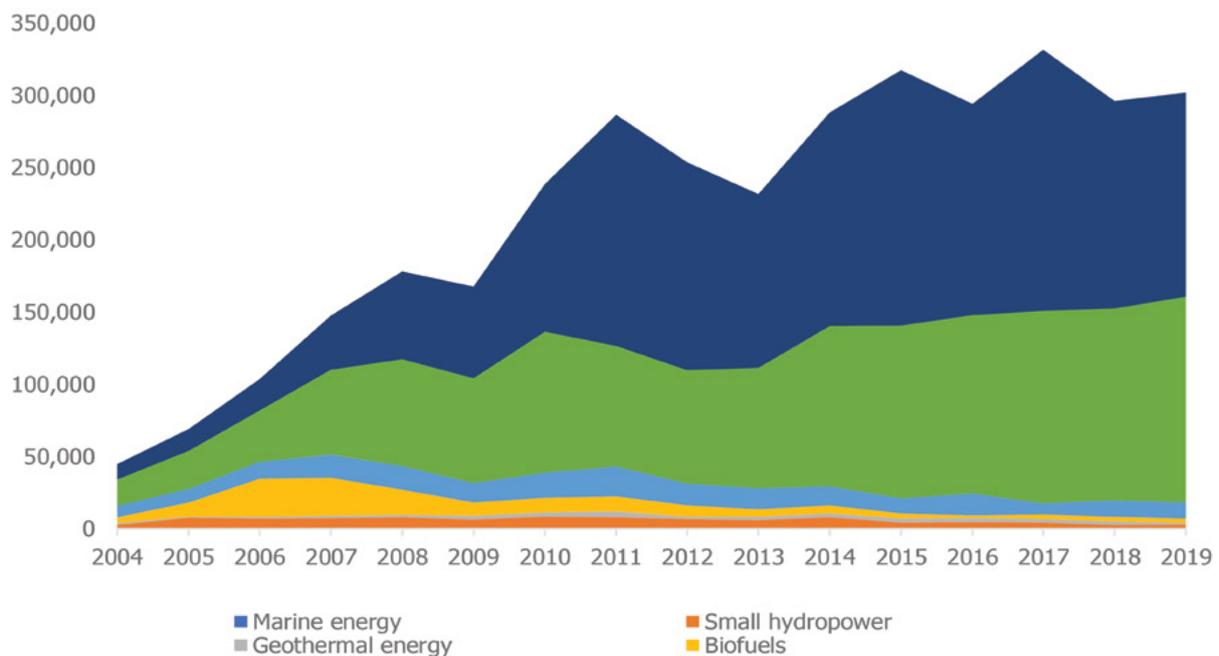
Gambar 3.9 Investasi Energi Bersih dan Bahan Bakar Fosil (Miliar USD)



Sumber: International Energy Agency

Beragam upaya dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) salah satunya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke penggunaan energi bersih. Oleh karenanya, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan investasi pada energi bersih. Gambar 3.9 menunjukkan tren peningkatan investasi pada energi bersih, diikuti oleh tren negatif pada investasi bahan bakar fosil. Terlihat bahwa terjadi akselerasi investasi energi bersih sejak tahun 2021 dimana terjadi peningkatan investasi pada sektor tersebut sebesar 11 persen (yoy) dan berlanjut pada tahun berikutnya yang tumbuh sebesar 14 persen (yoy) di tahun 2022. Di sisi lain, terjadi tren yang cenderung menurun pada investasi bahan bakar fosil. Diperkirakan tren ini akan terus berlanjut mengingat urgensi transformasi konsumsi bahan bakar.

Gambar 3.10 Investasi Energi Bersih Berdasarkan Jenis (Juta USD)

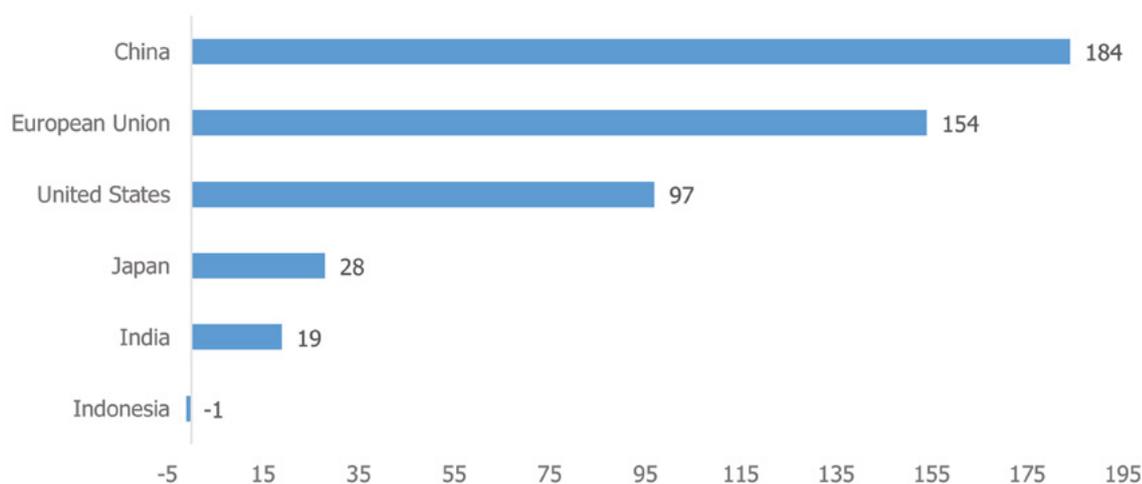


Sumber: Our World in Data

Fokus investasi pada energi bersih terutama tertuju pada pengembangan energi matahari dan angin. Energi matahari merupakan sumber daya yang melimpah. Laju penyerapan energi surya oleh Bumi sekitar 10.000 kali lebih besar daripada laju konsumsi energi oleh manusia. Meskipun tidak semua negara memiliki energi matahari yang sama, kontribusi yang signifikan terhadap bauran energi dari energi matahari langsung dapat dilakukan oleh setiap negara. Selain itu, biaya produksi panel surya telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya tidak hanya terjangkau tetapi juga merupakan bentuk listrik termurah. Oleh karenanya, energi ini menjadi alternatif dari konsumsi energi fosil yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam jangka waktu dekat.

Hal ini juga berlaku untuk energi angin dimana memiliki kelimpahan yang serupa dengan matahari. Energi angin menawarkan solusi jangka panjang dan ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, investor tertarik pada industri pembangkit listrik tenaga angin karena penurunan biaya proyek dan prospek pembangkit listrik tenaga angin yang menghasilkan energi murah dan bersih dalam jumlah besar. International Renewable Energy Agency memprediksikan total biaya instalasi proyek pembangkit angin di darat (*onshore*) akan terus menurun dalam tiga dekade ke depan dengan biaya rata-rata turun ke kisaran USD800 hingga 1.350 per kilowatt (kW) pada tahun 2030 dan USD650 hingga 1.000/kW pada tahun 2050. Angka ini menurun signifikan dari biaya rata-rata global yang mencapai USD1.497/kW pada tahun 2018. Hanya saja industri pembangkit angin baru-baru ini menghadapi tantangan, invansi Rusia ke Ukraina yang mendisrupsi rantai pasokan proyek sehingga meningkatkan biaya bahan baku dan tenaga kerja.

Gambar 3.11 Penambahan Investasi Energi Bersih Baru Selama 2022 (Miliar USD)



Sumber: International Energy Agency

Apabila dilihat berdasarkan negara, Tiongkok memimpin investasi energi hijau dengan jumlah investasi sebesar USD184 miliar pada tahun 2022. Tiongkok secara masif melakukan investasi pada pengembangan teknologi energi bersih untuk mempersiapkan periode setelah tahun 2030 dimana ditargetkan untuk mereduksi penggunaan bahan bakar fosil. Hal ini terbukti dari data yang dirilis oleh National Energy Administration (NEA) Tiongkok dimana total kapasitas pembangkit listrik yang sudah terpasang di negara ini adalah sekitar 2,85 miliar kilowatt pada akhir November atau naik 13,6 persen (yoy). Secara rinci, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya mencapai 560 juta kilowatt sedangkan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin mencapai lebih dari 410 juta kilowatt.

Kemajuan pengembangan teknologi di Tiongkok telah secara signifikan mengurangi biaya energi terbarukan. Negeri ini memproduksi 50 persen peralatan tenaga angin dunia dan 80 persen peralatan tenaga surya. Tiongkok berhasil menurunkan biaya pemasangan peralatan *photovoltaic* sekitar 82 persen pada tahun 2021 dibandingkan dengan biaya pada tahun 2010. Sementara itu, biaya pemasangan tenaga angin setidaknya telah menurun sebesar 35 persen.

Di sisi lain, Tiongkok merupakan kontributor emisi terbesar di dunia dengan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sangat tinggi. Dibalik pengembangan energi terbarukan yang pesat, Tiongkok masih secara intensif menggunakan bahan bakar fosil. Sampai saat ini, Tiongkok masih menjadi negara importir batu bara terbesar di dunia dan memperluas kapasitas produksi batu bara untuk ketahanan energi nasional.

Pada tahun 2022, Uni Eropa mencatatkan investasi baru terhadap energi bersih sebesar USD154 miliar. Uni Eropa mengalami akselerasi transisi energi dikarenakan krisis energi yang sempat melanda wilayah tersebut dimana harga gas sempat melonjak hingga 45,4 persen (yoy) pada semester kedua 2022. Hal ini disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina yang menghambat pasokan bahan bakar fosil ke Uni Eropa.

Pada tahun 2022, emisi gas rumah kaca Uni Eropa menurun sekitar 3 persen pada tahun 2022, mencapai pengurangan 32,5 persen dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Didorong oleh penurunan drastis pada impor bahan bakar fosil dari Rusia dengan mengurangi impor minyak bumi hingga 90 persen dan mengurangi impor gas dari 155 bcm pada tahun 2021 menjadi sekitar 80 bcm pada tahun 2022. Selain itu, Uni Eropa meningkatkan kapasitas energi surya sebesar 41 GW ditahun 2020 atau 60 persen lebih tinggi dari tahun 2021. Kapasitas produksi energi angin juga meningkat 45 persen dari tahun sebelumnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut *Paris Agreement* memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. Bahkan Indonesia menguatkan komitmennya dengan meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional. Semula, target Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen atas upaya sendiri dan 41 persen dari dukungan internasional.

Terdapat sejumlah kebijakan dalam rangka mereduksi emisi gas rumah kaca di Indonesia di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang kebijakan Energi Nasional. Dalam peraturan tersebut tertuang mengenai prioritas pengembangan serta penggunaan energi

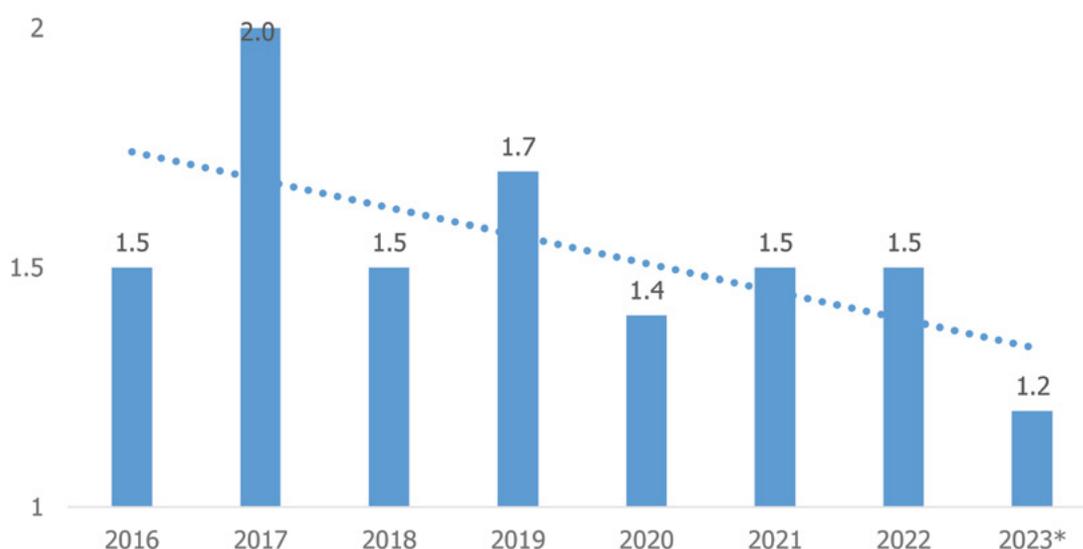
baru terbarukan (EBT) dan menurunkan peran minyak bumi pada ekonomi Indonesia. Kebijakan Energi Nasional tersebut berlaku sampai tahun 2050.

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2014 kemudian tertuang pada Peraturan Presiden No. 22 tahun 2017 mengenai Rencana Umum Energi Nasional. Rencana Umum Energi Nasional merupakan alat dan peta jalan pengelolaan energi nasional sampai tahun 2050. Pada peraturan tersebut tertuang target pemerintah dalam penggunaan EBT paling sedikit 23 persen dari total bauran energi di tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050.

Dukungan–dukungan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan dan penggunaan EBT di Indonesia. Terlebih, kondisi geografis Indonesia mendukung pengembangan EBT yang mana Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar. Pemanfaatan energi matahari menjadi potensi utama EBT di Indonesia. Terletaknya Indonesia di bawah garis khatulistiwa menyebabkan paparan sinar matahari di wilayah Indonesia cukup tinggi. Oleh karena itu, tercatat potensi energi matahari Indonesia mencapai 3.295 gigawatt (GW). Sayangnya, saat ini pemanfaatan energi matahari hanya sebesar 0,27 GW

Potensi EBT terbesar kedua merupakan energi angin yang pemanfaatannya bisa dioptimalkan hingga menghasilkan 155 GW. Namun, pemanfaatannya sampai saat ini masih sangat kecil yaitu sebesar 0,15 GW. Adapun potensi energi air dan energi laut sebesar 95 GW dan 60 GW. Sedangkan, potensi bio energi sebesar 57 GW dan panas bumi sebesar 24 GW.

Gambar 3.12 Total Investasi Energi Bersih Indonesia



Sumber: Kementerian ESDM

Dukungan dan potensi EBT yang dimiliki Indonesia mesti terus didorong. Realisasi investasi EBT masih stagnan berada di bawah USD2 miliar dan cenderung menurun dari tahun 2017–2023. Realisasi investasi EBT tertinggi tercatat sebesar USD2 miliar di tahun 2017. Hanya saja, angka ini menurun di tahun–tahun berikutnya. Berdasarkan data hingga November 2023, realisasi investasi pada EBT hanya sebesar USD1,2 miliar atau menurun 20 persen dari tahun sebelumnya.

Investasi dalam EBT di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan solusi strategis untuk mendorong perkembangan sektor ini. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur yang masih terbatas. Pembangunan proyek EBT memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transmisi listrik dan sistem penyimpanan energi. Kurangnya infrastruktur ini dapat meningkatkan biaya investasi dan menunda proyek-proyek EBT. Pengembangan EBT juga terhambat persoalan pengadaan lahan yang cenderung rumit di Indonesia.

Selain itu, risiko proyek EBT juga dianggap masih tinggi. Pengembangan EBT memerlukan biaya investasi yang besar dan pembangunannya memerlukan jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu yang panjang tersebut terdapat potensi adanya perubahan kebijakan, perubahan iklim, manajerial yang kurang memadai ataupun terganggunya rantai pasok. Oleh karenanya, proyek EBT dinilai lebih riskan dari proyek-proyek konvensional lainnya.

Rendahnya permintaan domestik juga menjadi tantangan yang signifikan. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya energi terbarukan membuat masyarakat kurang termotivasi untuk mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, biaya implementasi teknologi EBT yang masih tergolong mahal dibandingkan energi konvensional menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk menggunakan EBT.

Kesadaran publik yang semakin menguat terhadap perubahan iklim menjadi dorongan bagi industri perbankan untuk mendukung perkembangan sektor energi baru terbarukan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran signifikan dalam intermediasi keuangan menjadi aktor penting dalam penyaluran modal untuk proyek – proyek EBT. Penyusunan taksonomi hijau merupakan salah satu langkah akomodatif untuk mengidentifikasi proyek – proyek yang dikategorikan sebagai “hijau”. Panduan tersebut diharapkan dapat membantu lembaga keuangan khususnya bank dalam penyaluran kredit ke sektor hijau.

Industri perbankan meyakini dan sangat mendukung perkembangan EBT melalui penyaluran kredit ke sektor tersebut. Pembiayaan pada proyek – proyek EBT memberikan tantangan bagi

perbankan. Pertama, *return on investment* (ROI) yang sulit diprediksi. ROI merupakan salah satu indikator yang digunakan perbankan untuk menilai *feasibility* calon proyek yang akan diberikan kredit. ROI untuk proyek EBT lebih sulit untuk diperkirakan karena aliran kas masuk pada proyek EBT dipengaruhi oleh faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti cuaca dan iklim. Sumber EBT yang sangat bergantung pada kondisi alam menyebabkan ketersediaan pasokan energi terbarukan berpotensi untuk tidak menentu.

Kedua, *energy return on investment* (EROI) EBT yang tergolong rendah. EROI merupakan indikator yang mengukur jumlah energi yang dihasilkan dari input yang digunakan pada suatu pembangkit energi. Semakin tinggi EROI maka semakin efisien proses produksi energi. Oleh karenanya, EROI menjadi indikator untuk menganalisis nilai keekonomian proyek pembangkit energi dan menjadi penentu utama harga energi karena sumber energi yang dapat diperoleh dengan biaya yang relatif lebih murah akan memungkinkan harga energi tetap rendah.

Ketiga, risiko kredit yang relatif lebih tinggi dari proyek – proyek konvensional. Pengembangan EBT tergolong baru sehingga ketersediaan informasi belum memadai. Proyek – proyek pengembangan EBT yang sukses pada negara lain, tidak sepenuhnya bisa menjadi acuan penilaian risiko kredit karena setiap negara memiliki *nature* yang berbeda. Terlebih lagi, ketidakpastian aliran kas masuk yang diciptakan oleh proyek – proyek EBT dan periode investasi dalam waktu panjang meningkatkan kekhawatiran terjadinya permasalahan solvabilitas pada proyek tersebut

3.3. UMKM Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dimana ukuran usaha ini mendominasi 99 persen total usaha di Indonesia. Oleh karenanya, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96 persen dari total tenaga kerja. Tidak hanya itu, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yaitu berkisar 60 persen dari total PDB. Maka dari itu, menjaga resiliensi dan mendukung perkembangan UMKM menjadi krusial bagi perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya.

UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan mereka. Salah satu masalah utama adalah akses terbatas terhadap pendanaan. UMKM mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena minimnya jaminan dan riwayat kredit yang terbatas. Terlebih lagi, kurangnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM juga menjadi hambatan yang mempersulit mereka dalam mengelola keuangan,

merencanakan ekspansi usaha, dan mencari sumber pendanaan. Selain itu, persaingan yang semakin ketat, terutama dengan terbukanya pasar global melalui penggunaan teknologi digital seperti *e-commerce*, memaksa UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi dan strategi pemasaran modern agar dapat bersaing secara efektif di pasar yang terus berubah. Namun, kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap teknologi digital menyebabkan UMKM sulit untuk bersaing pada kondisi pasar saat ini.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, pemerintah secara intensif memberikan dukungan melalui instrumen kebijakan maupun pelaksanaan program bantuan. Dukungan ini salah satunya tercermin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dimana terdapat amanat untuk penguatan UMKM. Di antaranya adalah transformasi usaha informal ke formal dan digitalisasi UMKM.

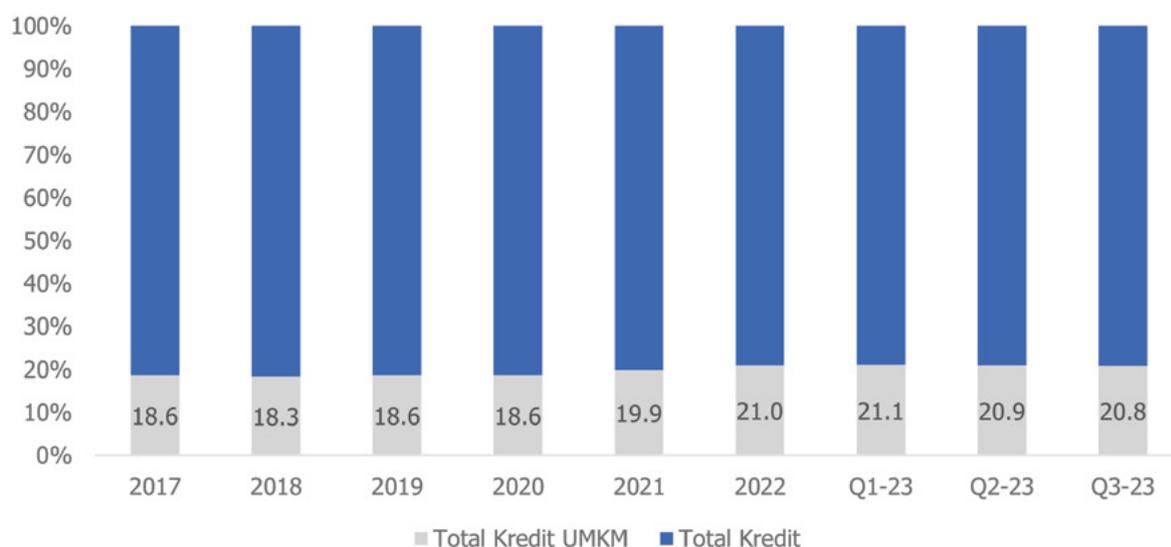
Berdasarkan RPJMN tersebut, sejumlah kementerian/lembaga (K/L) melaksanakan kebijakan atau program untuk meningkatkan izin usaha dan digitalisasi UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong UMKM memiliki nomor induk berusaha (NIB) agar UMKM tercatat secara resmi dan rapi sehingga mempermudah mereka untuk akses pendanaan dan ekspansi bisnis. Terlebih, pemerintah juga telah berupaya untuk mempermudah kepemilikan NIB untuk UMKM melalui peraturan turunan dari Peraturan Pengganti Undang–Undang Cipta Kerja dimana pembuatan NIB tidak dipungut biaya.

Dari sisi percepatan adopsi teknologi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki tiga pendekatan untuk mendorong adopsi teknologi digital untuk UMKM. Pendekatan pertama adalah pembangunan infrastruktur seperti Menara BTS yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kedua melaksanakan pelatihan dan pendampingan untuk mengonversi UMKM konvensional ke digital. Kominfo secara khusus telah melaksanakan pelatihan dan pendampingan adopsi teknologi digital kepada 30.000 pelaku UMKM di sektor pengolahan di 15 kawasan prioritas. Langkah ketiga merupakan peningkatan kapasitas UMKM sehingga berdaya saing.

Adapun dukungan pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan UMKM salah satunya adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum *bankable* atau belum memenuhi syarat dari agunan tambahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 317 Tahun 2023, KUR mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Oleh karenanya, bunga pada produk KUR lebih rendah dari yang seharusnya. Sebagai contoh, KUR jenis Super

Mikro mendapatkan suku bunga sebesar 3 persen setelah disubsidi oleh pemerintah maksimal 15 persen. Harapannya, subsidi bunga ini dapat menjadi daya tarik bagi UMKM untuk mendapatkan permodalan di lembaga keuangan formal yaitu bank.

Gambar 3.13 Porsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK

Pemerintah memberikan target bagi industri perbankan untuk menyalurkan kredit ke UMKM hingga 30 persen dari total portofolio kredit perbankan pada tahun 2024. Hanya saja, sampai saat ini proporsi penyaluran kredit UMKM terbatas di angka 20 persen dari total kredit perbankan. Oleh karenanya, ini merupakan tantangan bagi industri perbankan untuk meningkatkannya mengingat *gap* antara realisasi dan target masih sangat jauh.

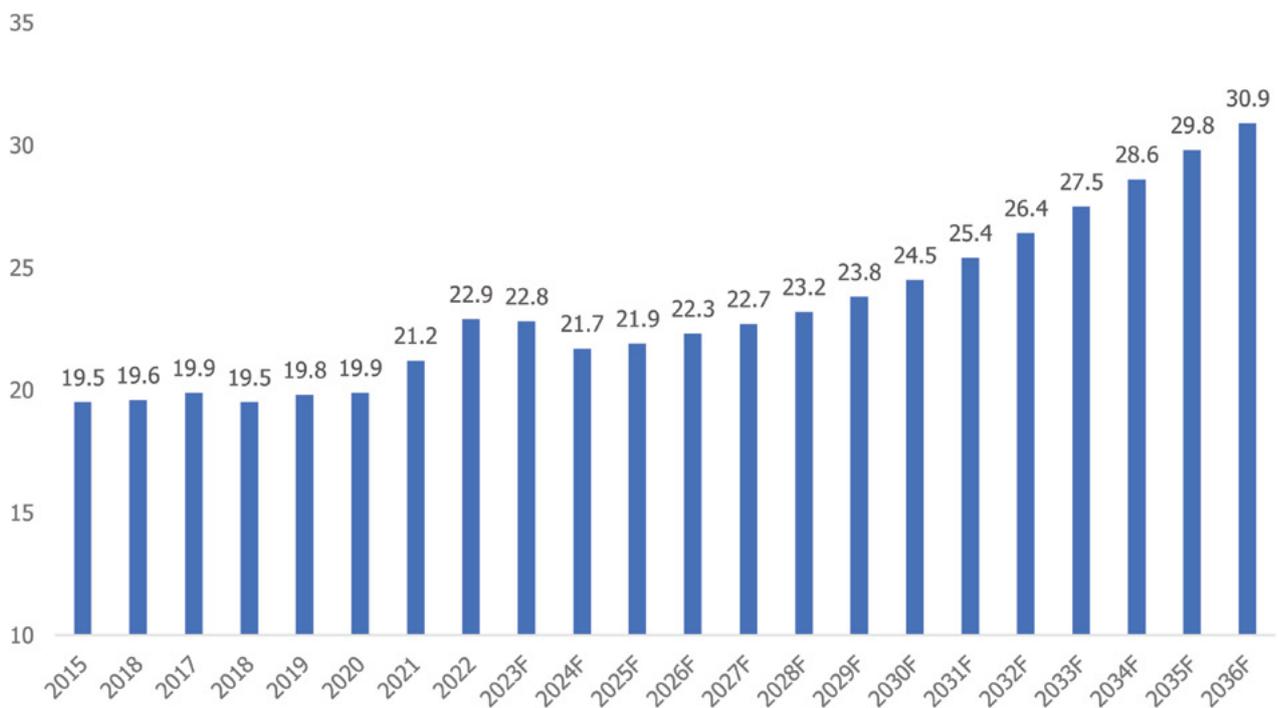
Menciptakan titik tengah antara kondisi UMKM dengan persyaratan kredit perbankan merupakan tantangan dalam penyaluran kredit perbankan ke UMKM. Adanya keterbatasan informasi dari perbankan ke UMKM (*asymmetric information*) akan kondisi keuangan dan aktivitas UMKM menyulitkan perbankan untuk menilai kelayakan kredit. Alhasil, risiko kredit UMKM menjadi tinggi.

Mayoritas UMKM di Indonesia tergolong informal sehingga sulit untuk memvalidasi informasi perusahaan. UMKM informal sering kali tidak memiliki pencatatan keuangan formal seperti laporan keuangan yang telah diaudit. Bahkan, sering kali UMKM tidak memiliki atau jarang menggunakan rekening keuangan sehingga menghambat bank dalam menggunakan data elektronik untuk menilai

arus kas UMKM. Akibatnya, proses penilaian kredit UMKM menjadi lebih rumit dan memakan banyak biaya bagi bank.

Aksesibilitas produk keuangan dan kecakapan pelaku UMKM dalam literasi keuangan merupakan salah satu kunci untuk *feasibilitas* kredit UMKM dari perbankan. Pelaku UMKM yang memiliki aktivitas rutin pada produk keuangan seperti transaksi bisnis yang masuk ke dalam rekening bank akan mempermudah perbankan untuk menilai kondisi usaha UMKM. Maka dari itu, mengingat peran penting dari inklusi dan literasi keuangan, industri perbankan selalu berupaya untuk meningkatkan kedua hal tersebut pada masyarakat Indonesia. Upaya perbankan dalam meningkatkan inklusivitas produk perbankan di masyarakat terlihat dari nilai inklusi keuangan perbankan yang tertinggi di antara lembaga keuangan lainya yaitu sebesar 74 persen. Hal ini juga berlaku pada literasi keuangan yang sebesar 49,9 persen. Meskipun saat ini masih terdapat *gap* antara inklusi dan literasi keuangan yang menekan optimalisasi penggunaan produk perbankan, industri perbankan selalu berupaya untuk mempersempit jarak tersebut.

Gambar 3.14 Proyeksi Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan (%)



Sumber: BRI Research Institute 2022

BRI Research Institute (2022) melakukan proyeksi akan tercapainya target proporsi 30 persen kredit UMKM. Model dibentuk dengan asumsi kondisi ekonomi stabil dimana tidak terjadi fluktuasi yang signifikan dalam indikator makroekonomi Indonesia. Asumsi tersebut terdiri dari perekonomian yang tumbuh stabil di 5,5 persen, laju inflasi yang terjaga di level 3,5 persen, pertumbuhan *base money* sebesar 12,5 persen, suku bunga KUR sebesar 6 persen, dan pertumbuhan target penyaluran KUR sebesar 32 persen per tahun. Hasil dari permodelan menunjukkan bahwa kredit UMKM sebesar 30 persen dari total kredit baru akan tercapai pada tahun 2036. Artinya, apabila tidak ada perubahan signifikan baik dari kondisi ekonomi maupun kebijakan maka akan sulit bagi perbankan untuk mencapai target 30 persen di tahun 2024.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa profil debitur KUR Kecil mirip dengan debitur Kupon dan kredit komersial lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa level *entrepreneurship* KUR Kecil adalah *bankable* dan *feasible* sehingga pembiayaan KUR kepada segmen kecil berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, memungkinkan untuk UMKM dengan profil yang serupa dengan debitur KUR Kecil untuk mendapatkan akses pendanaan kredit non-KUR sehingga potensi penyaluran kredit UMKM menjadi lebih besar.

Hanya saja, struktur UMKM Indonesia yang dominan berada di level mikro yaitu sebanyak 63,3 juta unit usaha menjadi tantangan bagi pembiayaan dari perbankan mengingat kuota KUR yang terbatas. Tidak hanya itu, bank tetap perlu mempertahankan prinsip kehati-hatian untuk menilai calon penerima KUR. Maka dari itu, proses “naik kelas” bagi UMKM menjadi langkah kunci dalam meningkatkan akses dan dukungan finansial yang memadai. UMKM “naik kelas” bukan hanya meningkatkan aksesibilitas permodalan tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM Indonesia.

UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam ekonomi Indonesia namun secara produktivitas jauh lebih rendah dari perusahaan besar. Total usaha UMKM adalah sebanyak 64,2 juta UMKM dan berhasil berkontribusi sekitar 61% dari total PDB atau sebesar Rp7.503 triliun dari PDB atas harga konstan di tahun 2023. Di sisi lain, jumlah usaha besar jauh lebih kecil dari UMKM yaitu hanya sebanyak 5.550 dan kontribusinya berkisar 39% dari PDB yaitu Rp4.797 triliun. Namun jika dihitung produktivitasnya, secara rata – rata satu UMKM berkontribusi sebesar Rp116 juta per tahun terhadap PDB, sedangkan satu usaha besar secara rata-rata berkontribusi Rp864 miliar.

Selain produktivitas yang terbatas, keterkaitan UMKM terhadap rantai pasok global sangat rendah. Kontribusinya terhadap ekspor Indonesia hanya 15,7 persen yang mana masih lebih rendah dari

negara tetangga, Malaysia. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekosistem UMKM Indonesia sangatlah terbatas. UMKM perlu diikutsertakan dalam setiap rantai pasok baik domestik maupun internasional sehingga terjadi perluasan pasar bagi UMKM. Pengembangan pasar yang inklusif terhadap UMKM diperlukan untuk meningkatkan produktivitas UMKM.

Pembaruan data mengenai jumlah UMKM di Indonesia secara berkala dan selengkap mungkin merupakan langkah esensial dalam menjamin keefektifan kebijakan yang diimplementasikan oleh otoritas pemerintahan dan institusi perbankan. Ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sektor UMKM dengan lebih tepat, serta menyesuaikan strategi dan intervensi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM kita. Data yang *reliable* dan terkini tidak hanya membantu dalam penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa dukungan finansial dan non-finansial dapat dialokasikan secara efisien. Hal ini penting untuk menyokong peningkatan kinerja UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dan penciptaan lapangan kerja.

Proyeksi Indikator Ekonomi 2024

Kesimpulan

Lampiran



4. PROYEKSI INDIKATOR EKONOMI 2024

Tabel 4.1 Proyeksi Indikator Utama Makroekonomi & Perbankan 2024

Indikator	2023	PERBANAS	Mandiri	BCA	BRI	UOB	BTN	BI
Pertumbuhan Ekonomi	5,0%F	5,0–5,2%	5,06%	5,00%	4,81–5,10%	5,20%	5,0–5,1%	4,7–5,5%
Inflasi	2,61%	2,91±1%	3,19%	3,20%	3,03 – 3,50%	3,00%	2,9%	2,5±1%
Nilai Tukar (Rp/USD) (End of Period)	15.415	15.698	15.296	16.037	15.109–400	14.500	15.500	15.510
Pertumbuhan Kredit (End of Period)	9,10%	9,80±1%	9,08%	10–11%	7,16–8,55%	-	9,5%	10–12%
Pertumbuhan Deposit (End of Period)	6,50%	6,50±1%	8,00%	8–9%	6,16–7,03%	-	8,0%	-

Ket: F=forecast

Sumber: Perhitungan Tim Ekonom PERBANAS, 2024

Tabel 4.2 Proyeksi Pertumbuhan Kredit Perbankan, by Sektor 2024

Sektor	2022	2023*	2024F
Pertambangan & Penggalian	51,3%	20,3%	22,6%
Jasa Keuangan & Asuransi	35,3%	21,9%	16,6%
Transportasi, Pergudangan, Informasi, & Komunikasi	5,9%	14,9%	12,7%
Pengadaan Listrik, Gas, & Air	1,2%	11,6%	12,5%
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor	7,4%	7,7%	9,9%
Industri Pengolahan	12,5%	5,8%	8,1%
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	10,4%	8,4%	7,8%
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,0%	5,2%	6,0%
Konstruksi	4,3%	0,2%	-2,1%

Sumber: Perhitungan Tim Ekonom PERBANAS, 2024

5. KESIMPULAN

Perekonomian Indonesia terus mengalami proses pemulihan yang stabil dan mengarah ke jalur pertumbuhan yang positif, menunjukkan terus terjadinya pemulihan ekonomi yang lebih lanjut pasca pandemi COVID-19. Jika merujuk pada kondisi ekonomi sebelum pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi Indonesia saat ini telah berhasil keluar dari pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh pandemi dan kembali ke arah tren pertumbuhan yang stabil di kisaran 5%. Tren pertumbuhan ini memberikan harapan akan keberlanjutan ekonomi Indonesia yang kuat dan tangguh.

Meskipun demikian, relatif dibandingkan 2022, terjadi penurunan kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kondisi global yang kurang kondusif, kenaikan harga pangan, penurunan stimulus fiskal, dan ketidakpastian terkait Pemilu 2024 yang membuat para pelaku ekonomi, terutama investor, menjadi lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor ini telah mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk konsumsi, investasi, dan perdagangan.

Meskipun kondisi perekonomian pada tahun 2023 mengalami sedikit pelemahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, proyeksi menuju tahun 2024 menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang positif dan lebih tinggi dibandingkan 2023. Dengan adanya langkah-langkah kebijakan yang tepat dan potensi stabilitas politik pasca-Pemilu, diharapkan ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh di atas 5%.

Proyeksi hasil Pemilu 2024, terlepas dari siapa pun yang akan memenangkan kontestasinya, kemungkinan besar tidak akan menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan atau radikal. Dengan demikian, diperkirakan bahwa *"business as usual"* akan tetap dominan pada perekonomian Indonesia, yang mana dapat memberikan kepastian dan stabilitas bagi para pelaku bisnis dan investor dalam jangka dekat dan setidaknya lima tahun ke depan.

6. LAMPIRAN

Tabel 6.1 Perkembangan Kredit Perbankan, by Sektor 2019-2023 (Miliar Rp)

Industri	2019	2020	2021	2022	Sep-21	Q3-22	Q3-23	% yoy	% ytd	% Porsi Terhadap Total Kredit
Perdagangan	1.006,1	942,2	974,4	1.043,9	965,1	1.047,7	1.105,8	5,55	5,93	16,17
Manufaktur	931,7	893,6	951,1	1.067,0	911,9	1.047,5	1.080,4	3,14	1,26	15,80
Pertanian	369,9	385,6	415,5	458,3	403,0	447,3	480,5	7,43	4,85	7,03
Konstruksi	362,3	376,5	380,4	396,6	384,2	386,9	399,7	3,32	0,79	5,85
Transportasi dan Pergudangan	246,9	266,2	306,2	313,1	296,3	319,0	354,6	11,15	13,26	5,19
Perantara Keuangan	249,8	216,3	224,7	305,8	216,6	271,9	345,7	27,15	13,05	5,06
Properti	269,4	260,0	265,3	314,6	255,3	304,7	345,1	13,28	9,72	5,05
Pertambangan dan penggalian	134,3	124,6	153,8	237,4	147,2	220,1	270,0	22,66	13,74	3,95
Listrik, Gas, Air	198,3	168,9	159,7	162,3	175,7	160,6	173,1	7,81	6,64	2,53
Komunitas	82,5	89,5	95,7	114,7	96,2	112,2	145,0	29,25	26,44	2,12
Akomodasi	109,8	116,2	120,7	123,6	120,8	122,6	128,2	4,57	3,71	1,88
Lainnya	28,9	30,9	34,3	43,8	30,5	37,1	54,2	46,25	23,66	1,34
Total Industri	4.057,5	3.934,1	4.148,0	4.651,2	4.069,2	4.545,6	4.959,8	9,11	6,63	72,54
Lainnya	652,4	673,0	694,7	773,0	684,9	748,8	795,8	6,28	2,94	11,64
Kepemilikan Rumah	479,9	496,6	544,0	586,6	530,2	570,3	642,5	12,66	9,54	9,40
Non Industri	240,2	227,2	235,8	247,9	226,8	243,2	262,3	7,87	5,84	3,84
Kepemilikan Kendaraan	140,4	105,8	99,1	116,0	96,1	118,5	126,4	6,67	9,03	1,85
Kepemilikan Apartemen	22,3	22,8	26,1	27,9	24,9	27,6	29,1	5,25	4,09	0,43
Konsumsi Rumah Tangga	24,3	22,0	20,8	21,0	20,7	20,9	21,4	2,18	1,83	0,31
Total Non-Industri	1.559,5	1.547,5	1.620,5	1.772,3	1.583,6	1.729,3	1.877,5	8,57	5,94	27,46
Total Kredit	5.617,0	5.481,6	5.768,6	6.423,6	5.652,8	6.274,9	6.837,3	8,96	6,44	100

Sumber: OJK

Tabel 6.2 Pertumbuhan Kredit Perbankan, by Sektor 2014-2023 (Miliar Rp)

Kredit Sektoral	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Q-3 2023	Porsi Terhadap Total Kredit (%)
Perdagangan	9,95	11,44	9,28	6,97	7,89	5,43	-3,99	19,01	9,15	4,70	47,43
Pertanian	13,10	12,07	9,71	17,48	13,75	17,23	16,54	31,96	32,67	16,63	16,47
Manufaktur	12,43	13,26	10,03	10,66	6,28	7,99	0,44	19,30	5,84	7,28	10,03
Jasa Masyarakat	20,69	-3,10	-2,86	19,31	8,41	5,89	5,03	18,43	14,36	17,53	5,53
Penyediaan Akomodasi	16,61	23,77	18,13	7,68	13,78	14,49	11,82	20,86	4,76	7,40	4,57
Konstruksi	4,73	6,48	11,43	15,80	12,04	4,20	-19,28	9,50	-9,24	8,52	4,02
Properti	5,99	10,26	4,36	11,63	12,54	11,97	-13,78	3,86	5,20	5,86	3,63
Transportasi	1,25	5,90	4,94	14,73	20,78	11,83	-5,27	4,10	8,10	18,31	3,61
Perikanan	12,04	7,09	7,08	24,48	21,46	20,03	16,76	46,19	8,61	7,11	1,19
Kesehatan	13,38	16,47	8,05	8,75	23,68	6,43	-9,86	51,57	6,03	10,80	0,93
Perantara Keuangan	4,40	-1,63	-4,41	7,36	10,55	-13,40	-18,51	-12,88	8,34	10,74	0,82
Pendidikan	3,61	23,97	1,51	-1,04	26,07	0,58	6,03	115,32	3,13	5,26	0,64
Pertambangan	0,20	1,58	-2,80	14,39	22,83	20,26	-5,20	19,05	-21,06	-7,54	0,51
Listrik, Air, Gas	24,96	-4,91	20,30	43,00	20,41	45,99	-42,70	5,69	-6,37	44,70	0,32
Layanan Perorangan	39,46	14,23	-5,88	2,75	-4,76	0,45	1,81	70,09	2,63	-2,56	0,27
Administrasi Pemerintahan	-22,30	5,45	-4,87	-20,56	202,27	-73,31	-38,03	142,94	80,80	-39,90	0,02
Lembaga Internasional	-37,76	-82,58	576,09	-60,55	-93,85	50,00	-16,67	-8,24	229,42	119,46	0,00
Aktivitas Bisnis Lainnya	161,23	-77,18	-5,02	91,90	-54,43	8,33	-16,48	263,60	-	-	0,00
Total Pertumbuhan Kredit UMKM	10,33	10,14	8,42	10,08	9,85	7,66	-2,19	19,53	10,47	8,34	100,00

Sumber: OJK

Griya Perbanas Lt. 1
Jl. Perbanas Karet Kuningan, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya



www.perbanas.org



Perhimpunan Bank Nasional



[perbanas_official](https://www.instagram.com/perbanas_official)